



**ANALISIS WACANA THEO VAN LEEUWEN DALAM BERITA
POLITIK SURAT KABAR *HALUAN RIAU***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan**

**SOFIA NAILATI
NPM 166211027**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS WACANA THEO VAN LEEUWEN DALAM BERITA
POLITIK SURAT KABAR *HALUAN RIAU*

Dipersiapkan Oleh

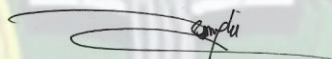
Nama : Sofia Nailati
NPM : 166211027
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembimbing



Alber, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1010058801

Mengetahui
Ketua Program Studi



Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed
NIDN. 1019078001

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Islam Riau

dan Dekan Bidang Akademik



Dr. H. H. Hastuti, M.Pd
NIDN. 0011095901

SKRIPSI

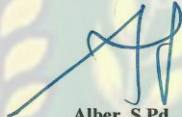
ANALISIS WACANA THEO VAN LEEUWEN DALAM BERITA
POLITIK SURAT KABAR HALUAN RIAU

Dipersiapkan Oleh

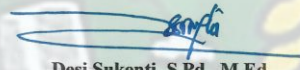
Nama : Sofia Nailati
NPM : 166211027
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembimbing

Anggota Tim



Alber, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1010058801



Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed.
NIDN. 1019078001



Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1021038801

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Riau



Dr. Yity Hastuti, M.Pd
NIDN. 0011095901

SURAT KETERANGAN

Saya pembimbing skripsi dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang di bawah ini:

Nama : Sofia Nailati

NPM : 166211027

Program Studi: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Telah selesai menyusun skripsi dengan judul "*Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar Haluan Riau*", dan siap untuk diujikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juli 2020

Pembimbing


Alber, S.Pd., M.Pd.

NIDN 1010058801

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jalan KH. Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Provinsi Riau, Kode Pos: 28284

SURAT KETERANGAN

Nomor : 390/PSPBSI/VIII/2020

Hal : Bebas Plagiarisme

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini.

Nama : Sofia Nailati

NPM : 166211027

Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar Haluan Riau

Bahwa skripsi mahasiswa di atas telah memenuhi syarat bebas plagiat kurang dari 30%. Surat ini digunakan sebagai syarat untuk pengurusan surat *keterangan* bebas pustaka. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Ketua Program Studi,








Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed.

NIDN 1019078001

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI







Telah dilakukan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Sofia Nailati
NPM : 166211027
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata 1)
Pembimbing : Alber, S.Pd.,M.Pd.
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*

No	Tanggal	Buku Acara Bimbingan	Paraf
1	12 November 2019	Acc judul proposal	
2	6 Desember 2019	Perbaikan: 1. Mengganti objek penelitian 2. Metode analisis isi	
3	23 Desember 2019	Perbaikan: 1. Latar belakang 2. Rumusan masalah 3. Tujuan 4. Metode analisis isi	
4	30 Desember 2019	Perbaikan: 1. Latar belakang 2. Anggapan dasar 3. Daftar pustaka	
5	20 Januari 2020	Perbaikan : 1. Contoh pada latar belakang 2. Kutipan	

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

6	14 Januari 2020	Acc untuk diseminarkan	
7	20 Juli 2020	Perbaikan: 1. Deskripsi data 2. Tabel analisis data 3. Analisis data	
8	28 Juli 2020	Perbaikan : 1. Analisis data 2. Tabel	
9	3 Agustus 2020	Perbaikan : 1. Analisis data 2. Interpretasi data 3. Kesimpulan data	
10	10 Agustus 2020	Perbaikan : 1. Abstrak 2. Analisis data 3. Daftar pustaka	
11	11 Agustus 2020	Acc untuk diujikan	



Pekanbaru, 29 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dra. Hj. Tity Hastuti, M.Pd
NIDN 0011095901

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sofia Nailati

NPM : 166211027

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali ringkasan dan kutipan yang saya kutip dari berbagai sumber dan disebutkan sumbernya. Secara ilmiah saya yang bertanggung jawab atas ini serta kebenaran data dan fakta skripsi atau karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 11 Juli 2020

Saya menyatakan,



Sofia Nailati

ABSTRAK

Sofia, Nailati. 2020. *Skripsi. Analisis Wacana Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar Haluan Riau*

Penelitian ini berawal dari penyajian berita dalam media massa yang memberikan gambaran kebebasan pers yang benar-benar bebas sehingga aktor/pelaku sosial atau kelompok tertentu dimarjinalkan dalam sebuah pemberitaan dengan maksud tertentu. Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji tentang analisis wacana dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* berdasarkan teori Theo van Leeuwen. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teori Theo van Leeuwen strategi eksklusi dan inklusi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*? Tujuan peneliti ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, mengidentifikasi, menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi tentang teori Theo van Leeuwen strategi eksklusi dan inklusi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*. Teori dalam penelitian ini menggunakan teks wacana yang diperkenalkan oleh Theo van Leeuwen. Metode yang digunakan adalah *Content Analisis* (Analisis Isi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*Library research*). Dalam kajian analisis ini dapat disimpulkan teori eksklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* terdapat 7 data. Data yang paling banyak ditemukan yaitu pasivasi sebanyak 5 data, faktor penyebab terjadinya antara lain, strategi ini menghilangkan objek/pelaku dengan cara mempasifkannya sehingga penulis berita lebih cenderung menggunakan strategi ini. Selanjutnya, untuk teori inklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* terdapat 22 data. Data yang paling banyak ditemukan yaitu asimilasi-individualisasi sebanyak 6 data, faktor penyebab terjadinya strategi ini ketika di dalam pemberitaan bukan kategori pelaku sosial yang spesifik yang disebut di dalam berita, melainkan komunitas atau kelompok sosial seseorang tersebut berada, penulis berita cenderung membuat komunitas atau kelompok sosial si aktor/pelaku yang terdapat dalam berita agar menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Kata Kunci: *Analisis Wacana, Eksklusi, Inklusi, dan, Theo van Leeuwen*

ABSTRAK

Sofia, Nailati. 2020. Essay. Discourse Analysis of Theo van Leeuwen in the Political News of the *Haluan Riau* Newspaper.

This research begins with the presentation of news in the mass media which provides a picture of a truly free press freedom so that social actors / actors or certain groups are marginalized in news with a specific purpose. Leeuwen introduced a discourse analysis model to detect and examine how a group or a person is marginalized in a discourse. Therefore, this study examines the analysis of discourse in the political news of Haluan Riau newspaper based on Theo van Leeuwen's theory. The problem in this research is how the theory of Theo van Leeuwen's strategy of exclusion and inclusion in the political news of Haluan Riau newspaper? The purpose of this research is to describe, analyze, identify, interpret and conclude information about Theo van Leeuwen's theory of exclusion and inclusion strategies in the political news of Haluan Riau newspaper. The theory in this study uses discourse texts introduced by Theo van Leeuwen. The method used is Content Analysis. The approach used in this study is a qualitative approach. The type of research used is library research. In this analysis, it can be concluded that Theo van Leeuwen's theory of exclusion in the political news of Haluan Riau newspaper contains 7 data. The most common data found is passivation as much as 5 data, the factors causing the occurrence, among others, this strategy eliminates the object / actor by pacifying it so that news writers are more likely to use this strategy. Furthermore, for Theo van Leeuwen's theory of inclusion in the political news of Haluan Riau newspaper, there are 22 data. The most common data found is the assimilation-individualization of 6 data, the factors causing this strategy when in the news are not the specific social actor category mentioned in the news, but the community or social group the person is in, news writers tend to create communities or groups. social actors / actors in the news in order to give rise to different perspectives.

Keywords: Discourse Analysis, Exclusion, Inclusion, and, Theo van Leeuwen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Wacana Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya penulisan skripsi penelitian ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Dr. Hj. Sri Amnah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin penelitian;
- 2) Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau;
- 3) Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau;
- 4) Alber, S.Pd, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing,

mengarahkan serta berdiskusi dengan penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini;

- 5) Staf pengajar FKIP Universitas Islam Riau, terutama yang berdedikasi dilingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Islam Riau;
- 6) Kepala Tata Usaha FKIP Universitas Islam Riau beserta staf;
- 7) Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Hadinamora Siregar, S.P. dan ibunda Elydawati Nasution yang memberikan dukungan moral maupun material yang tak ternilai dan tak terukur dengan apapun, serta semangat, doa dan kesabaran yang luar biasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata;
- 8) Seluruh keluarga besar, dan sahabat penulis tidak dapat disebutkan satupersatu, atas dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis nantikan dari para pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi penelitian ini, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Pekanbaru, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Masalah	12
1.2 Tujuan Penelitian	12
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.3.1 Ruang Lingkup	12
1.3.2 Pembatasan Masalah	13
1.3.3 Penjelasan Istilah	14
1.4 Anggapan Dasar dan Teori	16
1.4.1 Anggapan Dasar	16
1.4.2 Tahapan Teori	16
1.5 Metodologi Penelitian	30
1.5.1 Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian	30
1.5.2 Sumber Data	31
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
1.5.4 Teknik Analisis Data	33
BAB 2 PENGOLAHAN DATA	36
2.1 Deskripsi Data	36
2.1.1 Teori Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan</i> <i>Riau</i>	36
2.1.2 Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan</i> <i>Riau</i>	38

2.2 Analisis Data	44
2.2.1 Teori Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>	44
2.2.2 Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>	53
2.3 Interpretasi Data.....	73
2.3.1 Teori Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>	74
2.3.2 Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>	75
BAB 3 KESIMPULAN	77
BAB 4 HAMBATAN DAN SARAN	81
4.1 Hambatan	81
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

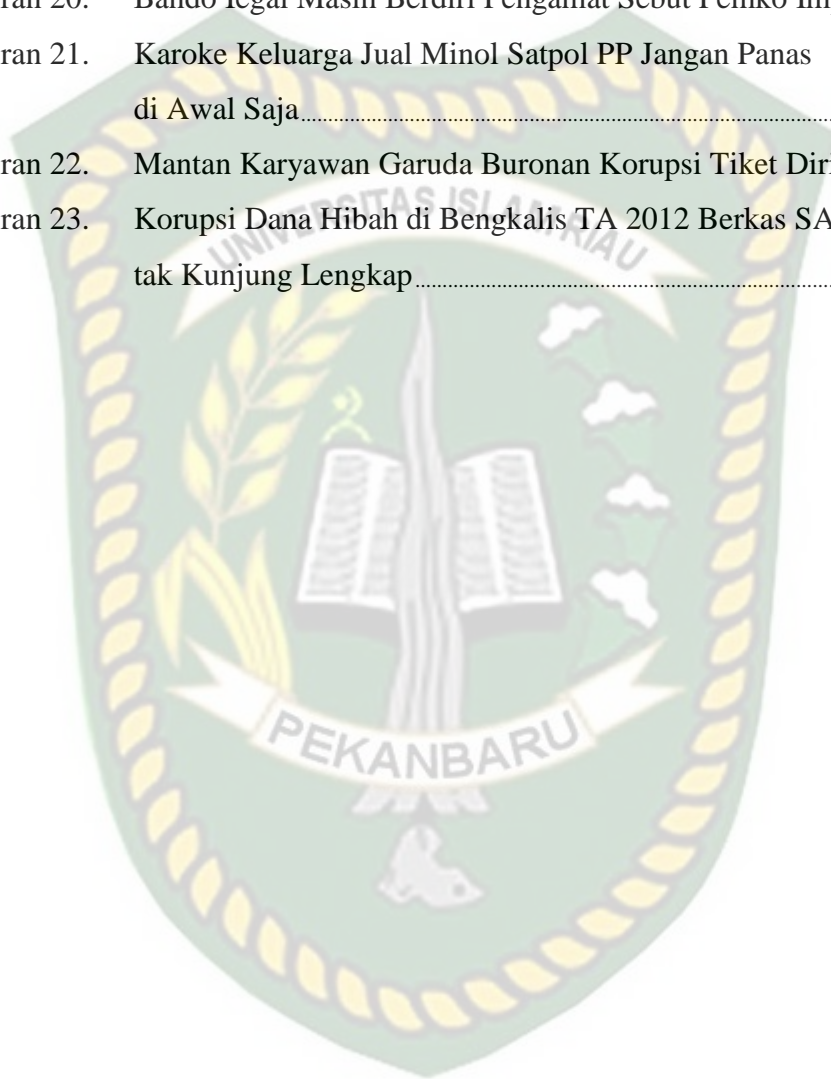
	Halaman
Tabel 1	
Teori Eksklusi Theo van Leeuwen yang Terdapat dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>	36
Tabel 2	
Teori Inklusi Theo van Leeuwen yang Terdapat dalam Berita Politik Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. APBD Riau 2019 Khawatir Target Tak Tercapai Realisasi di Bawah 70 Persen	85
Lampiran 2. Kilas Balik Politik 2019 Pertempuran Korban Jiwa Hingga Lawan jadi Lawan	86
Lampiran 2. Selama 2019 ICW: Vonis Ringan Koruptor Marak	87
Lampiran 3. Kasus Novel Bukan Pidana Biasa Tim Advokasi : Ada Pemufakatan Jahat	88
Lampiran 4. DPRD Riau Sayangkan Banyak Proyek 2019 tak Tuntas	89
Lampiran 5. 623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam	90
Lampiran 6. Seleksi Pansel Hakim MK Dinilai Penuh Catatan Buruk	91
Lampiran 7. Singgung Kasus Novel AHY Minta KPK tak Dilemahkan	92
Lampiran 8. Jabatan Presiden Dua Periode Sudah jadi Konvensi Internasional	93
Lampiran 9. Tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Meranti Capai 5,4 Miliar	94
Lampiran 10. Serapan Dana Kelurahan di Kuansing Sangat Rendah	95
Lampiran 11. Belum ada Niatan Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci	96
Lampiran 12. Tersandung Kasus Korupsi Dua ASN Pemprov Riau Belum Dipecat	97
Lampiran 13. Selalu Positif Narkoba Brigadir Aldes Dipecat	98
Lampiran 14. “Si garang” dari KPU Akhirnya Terpeleset Juga dengan Suap	99
Lampiran 15. Ngopi di Warung Saat Jam Kerja di Meranti Sebanyak 13 ASN & Honorer Terjaring Razia	100
Lampiran 16. Bamsuet Mundur Loyalis Sebut Ada Peran Utusan Presiden	101
Lampiran 17. Libur ASN Bertambah, Ahmad Doli: Kenapa Harus Dibuat Empat Hari	102

Lampiran 18.	Era Jokowi Mahfud Klaim tak Ada Pelanggaran HAM.....	103
Lampiran 19.	Disebut Lakukan Pembohongan Publik Kabag Kesra : Kami tak Ada Anggaran Untuk Itu	104
Lampiran 20.	Bando Iegal Masih Berdiri Pengamat Sebut Pemko Impoten	105
Lampiran 21.	Karoke Keluarga Jual Minol Satpol PP Jangan Panas di Awal Saja.....	106
Lampiran 22.	Mantan Karyawan Garuda Buronan Korupsi Tiket Diringkus	107
Lampiran 23.	Korupsi Dana Hibah di Bengkalis TA 2012 Berkas SA tak Kunjung Lengkap	108



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Media massa merupakan salah satu media yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai sosial di masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu dari lima fungsi yang dimiliki media massa dalam kehidupan masyarakat, yaitu pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Dari seluruh fungsi tersebut, fungsi penyebaran nilai/fungsi sosial merupakan fungsi paling utama dan menunjukkan kekuatan media massa dalam mempengaruhi masyarakat (Andheska, 2015:52). Melalui fungsi sosial itu, media dapat mewariskan norma-norma atau nilai-nilai tertentu kepada masyarakat.

Romli (2005:5) menuliskan dalam bukunya media massa adalah saluran, alat, atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa. Media massa menggunakan bahasa untuk menyebarkan informasi-informasinya kepada masyarakat dapat berupa lisan dan tulisan. Bahasa lisan berupa ujaran langsung dari penutur untuk mengungkapkan maksud dengan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar contohnya berita di televisi dan radio, sedangkan bahasa tulis dapat ditemukan di dalam surat kabar dan majalah.

Bahasa tulis khususnya surat kabar merupakan salah satu media informasi tertulis yang masih diminati oleh masyarakat saat ini meskipun saat ini banyak sekali media daring, seperti detik.com, okezone.com, dan vivanews.com, surat kabar masih menjadi sumber utama pencari informasi. Beberapa masyarakat lebih

menyukai sumber informasi dari surat kabar karena dianggap validitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan situs berita daring yang kerap kali memberikan berita palsu untuk menipu dan mengakali pembaca atau lebih kita kenal dengan istilah *hoax* (Sutrisna, 2017:17).

Surat kabar sudah merupakan suatu keperluan primer ditengah masyarakat modern, apabila sehari saja tidak membaca surat kabar, manusia-manusia modern merasa seolah-olah ketinggalan dalam mengikuti berita (Susanti, 2011:3). Di Indonesia, surat kabar sering disebut juga dengan istilah koran. Kata koran berasal dari bahasa belanda yaitu “krant”, dan dari bahasa Prancis, “courant”. Adapun defenisinya yakni suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik, surat kabar juga biasa berisi kartun, TTS, dan hiburan lainnya (Sumadiria, 2006:5).

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar kalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on line* internet (Sumaridia, 2017:65). Dalam sebuah surat kabar, dapat dijumpai bermacam-macam berita politik, ekonomi, olahraga, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kriminalitas, dan lain sebagainya (Susanti, 2011:4), jadi untuk kemajuan sebuah surat kabar harus menjaga variasi serta isinya dan mencakup seluruh persoalan hayati. Manusia-manusia modern tidak bisa hidup tanpa mendapatkan suguhan pers yang memenuhi keperluan masyarakat akan informasi.

Adanya keperluan masyarakat akan informasi tersebut maka bermunculanlah surat kabar-surat kabar khusus yang memuat berita-berita politik,

ekonomi, ilmu pengetahuan, olahraga, agama, kriminalitas, dan lain sebagainya. Salah satu berita yang menarik bagi masyarakat adalah berita-berita politik. Menurut Depdiknas (2008:1091) politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam penyajian berita khususnya berita politik, wartawan dan media dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam menyajikan peristiwa yang diberitakan. Hal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut yang bertujuan untuk memperjuangkan ideologinya maupun juga memarjinalkan ideologi yang lain (Yunisa, 2016:202).

Setelah masa Orde Baru, penyajian berita dalam media massa memberikan gambaran kebebasan pers yang “benar-benar bebas” (Sari, 2014:124). Terdapatnya Kebebasan pers tersebut juga memberikan pengaruh bagi wartawan. Wartawan yang sejatinya memberitakan kebenaran, saat ini telah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam menyajikan peristiwa yang diberitakan. Hal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut yang bertujuan untuk memperjuangkan ideologinya maupun juga memarjinalkan ideologi yang lain. Oleh karena itu, berita politik di dalam surat kabar perlu dikaji dan ditinjau kembali.

Dalam ilmu bahasa, terdapat salah satu cabang yang menitikberatkan perhatian dan kajiannya terhadap bahasa dalam kehidupan sosial, yaitu analisis wacana. Istilah analisis wacana memiliki pengertian yang sangat beragam, mengingat istilah ini digunakan di berbagai bidang ilmu seperti sosial, politik, psikologi, komunikasi, dan lain-lain. Pada bidang bahasa, analisis wacana

merupakan studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Secara spesifik, analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan hanya terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, analisis itu tidak dapat dibatasi pada deskripsi bentuk bahasa yang tidak terikat pada tujuan atau fungsi yang dirancang untuk menggunakan bentuk tersebut dalam urusan-urusan manusia.

Dari perspektif komunikasi, analisis wacana sebagai salah satu pilihan yang digunakan untuk isi media. Melalui analisis wacana, kita akan mengetahui bagaimana isi teks media, dan mengetahui bagaimana pesan itu disampaikan kepada kita melalui frase, kalimat, metafora, dan lainnya. Eriyanto (2001) menambahkan bahwa dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa ilmu bahasa dan ilmu komunikasi saling berkaitan dalam kajian analisis wacana ini, mengingat seluruh teks yang dikaji sebagai isi media massa tersebut berwujud bahasa.

Pusat kajian wacana bersifat emansipatoris, yakni berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, termajinalkan, dan tidak diberikan kesempatan bersuara baik atas dasar ras, warna kulit, agama, gender, atau kelas sosial (Andeska, 2015:54). Wacana lebih mengkritisi terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Karakteristik analisis wacana ini di antaranya adalah melihat teks sebagai bentuk dari interaksi. Sebuah wacana dapat dilihat bukan hanya sebagai bentuk pernyataan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk pernyataan, tuduhan,

atau ancaman. Wacana dapat digunakan untuk mendelegitimasi, mendiskriminasi, atau memarjinalisasi seseorang, kelompok, atau gagasan tertentu di dalam media massa.

Menurut Alwi (2003:419) rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan preposisi yang satu dengan preposisi yang lain itu membentuk kesatuan yang dinamakan wacana. Sumarlan (2003:15) wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan, seperti pidato, ceramah, dan dialog atau secara tertulis seperti cerpen, buku, surat yang dilihat dari koheren dan kohesinya. Jadi dari pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan wacana adalah satuan bahasa terbesar yang memiliki makna. Wacana dapat dibagi menjadi wacana lisan dan tulisan. Surat kabar termasuk kedalam wacana tulisan.

Pemahaman dasar analisis wacana adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa atau dipandang di dalam pengertian Inguistik tradisional, tetapi bahasa di dalam analisis wacana kritis dipahami sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik ideologi dan kekuasaan (Oktavia dan Silitonga, 2016: 203). Analisis wacana memiliki berbagai model atau teori, setiap teorinya terdapat karakteristik dan kajian yang berbeda-beda. Penulis memilih teori analisis wacana menurut Theo van Leeuwen yaitu mengemukakan bagaimana peristiwa dan pelaku sosial atau kelompok tertentu ditampilkan dalam sebuah wacana pemberitaan.

Model ini memungkinkan kita dapat mengetahui bagaimana suatu peristiwa, kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam sebuah wacana pemberitaan sehingga yang terlihat hanya keburukan salah satu pihak saja dan

menutupi alasan satu pihak melakukan suatu tindakan. Keadaan demikian dalam teks media karena adanya pihak yang sengaja dihilangkan (eksklusi) dan dilibatkan (inklusi) dalam konstruksi definisi realita oleh wartawan sehingga khalayak pembaca memaknai seseorang atau sekelompok secara buruk.

Menurut Leeuwen dalam Eriyanto (2000:173) ada 3 strategi eksklusi ketika sesuatu, seseorang atau kelompok dikeluarkan dalam teks yaitu, (1) pasivasi, (2) nominalisasi, (3) penggantian anak kalimat, kemudian ada 7 strategi inklusi ketika sesuatu, seseorang atau kelompok ditampilkan dalam teks yaitu, (1) diferensiasi-indiferensiasi, (2) objektivasi-abstraksi, (3) nominasi-kategorisasi, (4) nominasi-identifikasi, (5) determinasi-indeterminasi, (6) asimilasi-individualisasi, dan (7) asosiasi-diasosiasi.

Alasan penulis memilih teori Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* karena Leeuwen memperkenalkan teori analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan ke dalam suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan, dan digambarkan secara buruk. Selain itu kebebasan pers yang sudah penulis bahas di atas memberikan pengaruh yang besar terhadap wartawan. Wartawan yang sejatinya memberikan kebenaran, saat ini telah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam menyajikan peristiwa yang diberitakan. Hal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut yang bertujuan untuk memperjuangkan ideologinya maupun memarginalkan ideologi orang lain, oleh karena itu, wartawan cenderung

tidak netral dalam menulis berita. Dengan teori Theo van Leeuwen ini setidaknya masyarakat dapat lebih pintar lagi saat membaca berita dan tidak mudah terprovokasi.

Fenomena yang terjadi saat penulis membaca surat kabar *Haluan Riau* terdapat teori Theo van Leeuwen dalam berita politik *Haluan Riau*. Contoh yang terdapat pada berita politik *Haluan Riau* yaitu :

No	Strategi Wacana Inklusi	
1	Indiferensiasi	Hingga kini, penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan tersangka Suhendri Asnan (SA), belum juga rampung (Haluan Riau, Senin, 16 Desember 2020)
2	Diferensiasi	Hingga kini, penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan tersangka Suhendri Asnan (SA), belum juga rampung. Penyidik masih melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk Jaksa (Haluan Riau, Senin, 16 Desember 2020)

Berdasarkan contoh tersebut kalimat 1 termasuk strategi indiferensiasi karena jelas dikatakan, penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 terkesan diabaikan oleh penyidik karena dari tahun 2012 sampai sekarang belum ada perkembangan, sementara pada kalimat 2 ditampilkan opini mengenai “penyidik masih melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk Jaksa”. Teks ini memarjinalkan posisi Jaksa, dengan menampilkan penyidik masih melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk Jaksa, kata “berdasarkan” tersebut menggiring opini publik bahwa Jaksa lah yang menentukan jalan atau tidaknya penyidikan. Fakta seperti kenapa terkesan dibiarkan atau sudahkah pemerintah melakukan tindakan terhadap kasus tersebut

tidak ditampilkan, akibatnya yang tergambar dalam teks melulu perbedaan pandangan antara cara yang dianggap bagus dengan cara yang dipandang tidak bagus.

Diferensiasi ini dalam wujudnya yang lain, sering kali menimbulkan prasangka tertentu. Terutama dengan membuat garis batas antara pihak kita dengan pihak mereka, kita buruk sementara mereka baik. Menurut van Leeuwen, penggambaran kita dan mereka itu adalah strategi wacana tertentu untuk menampilkan kenyataan bagaimana lewat strategi wacana tertentu satu kelompok dikucilkan, dimarjinalkan, dianggap buruk. Hal ini sesuai dengan pendapat Eriyanto (2000:179) strategi indiferensiasi-diferensiasi merupakan strategi wacana, bagaimana suatu kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih baik.

Surat kabar *Haluan Riau* dipilih dalam penelitian ini karena di kota Pekanbaru koran *Haluan Riau* tidak asing lagi bagi masyarakat karena koran *Haluan Riau* harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Piliang (2018) menjelaskan keunggulan koran *Haluan Riau* yaitu Informasi di media massa khususnya media cetak diharapkan disajikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terkait hal ini, Harian Umum *Haluan Riau* dinilai sebagai media cetak yang paling baik dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyajian beritanya. Demikian diungkapkan Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umar Solikhun, kala mengunjungi *Haluan Riau*, Selasa (27/3).

Selain itu Surat Kabar *Haluan Riau* ini adalah satu dari Sembilan Surat Kabar tertua di Indonesia yang lahir pasca kemerdekaan RI. Surat kabar ini terbit

pertamakali di Bukit Tinggi 1948, ketika kota tersebut mempunyai posisi sangat penting selama perjuangan semasa Perang Kemerdekaan (1945-1949). Pendirinya, H Kasoema (alm) dkk (Harian Haluan).

Sepengetahuan penulis penelitian ini sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Pertama Yuli Asriani dalam skripsi tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul "Analisis Wacana Kritis Model Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Kriminal Koran *Harian Analisa* Edisi April 2019". Masalahnya yaitu penyampaian pemberitaan yang ditampilkan di dalam sebuah teks melalui pemakaian kata atau kalimat yang dipakai sehingga aktor ditampilkan secara buruk dengan ditemukannya penggunaan kalimat aktif, verba dan tanpa anak kalimat dalam berita kriminal di koran *Harian Analisa*. Teori yang digunakan peneliti yaitu teori Eriyanto dan metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya yaitu penggunaan model Eksklusi ditemukan 31 pasivasi (kalimat aktif), 22 nominalisasi (verba) dan 8 penggantian anak kalimat (tanpa anak kalimat) dari 13 berita criminal dalam koran *Harian Analisa* terbitan tanggal 1,2 dan 4 April 2019 (Asriani, 2019:65). Persamaan penelitian penulis dengan Yuli Asriani adalah sama-sama meneliti penggunaan teori Theo van Leeuwen. Hanya saja pembahasan didalamnya berbeda yaitu Yuli Asriani hanya memahas teori eksklusi, objek yang dibahas juga berbeda Yuli Asriani membahas teori eksklusi Theo van Leeuwen dalam berita kriminal surat kabar *Harian Analisa*. Penulis meneliti teori eksklusi dan inklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* jadi, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lanjutan.

Kedua, Yunisa Oktavia dan Frangky Silitonga dalam jurnal Volume 1 Nomor 2, September 2016 Universitas Putra Batam, yang berjudul “Implementasi Analisis Wacana Kritis Perspektif Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Padang Ekspres* Terhadap Pembelajaran Bahasa Berbasis Teks”. Masalahnya yaitu (1) perjuangan ideologi *Padang Ekspres* melalui berita politik dan tajuk rencana dari sudut pandang strategi eksklusif dan inklusif, (2) permajinalan ideologi melalui berita dan tajuk rencana politik dari sudut pandang strategi eksklusif dan inklusif, dan (3) indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam memperjuangkan dan memarjinalkan ideologi melalui berita politik dan tajuk rencana. Teori yang digunakan yaitu teori Eriyanto model analisis wacana krisis menurut Leeuwen, dan metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan antara wacana dan kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya beroperasi lewat jalur-jalur formal, hukum dan institusi negara dengan kekuasaannya untuk melarang dan menghukum tetapi juga beroperasi lewat serangkaian wacana untuk mendefinisikan sesuatu atas suatu kelompok sebagai tidak benar atau digambarkan secara buruk dan dapat memarjinalkan kelompok lain. Persamaan penelitian penulis dengan Yunisa Oktavia dan Frangky Silitonga adalah sama-sama meneliti analisis wacana perspektif Leeuwen dalam surat kabar dengan tema berita politik. Perbedaan penelitian penulis dengan Yunisa Oktavia dan Frangky Silitonga adalah objek penelitian penulis menggunakan surat kabar *Haluan Riau* sedangkan Yunisa Oktavia dan Frangky Silitonga menggunakan objek surat kabar *Padang Ekspres*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silvia Permata Sari, dalam jurnal Sastra Indonesia dan pengajarannya Volume 25 Issue 2 124-137, Mei 2014,

ISSN 1412-5854. Yang berjudul “Analisis Wacana Kritis pada Berita Kriminal Surat Kabar *Posmetro Padang*”. Masalah dari penelitian ini bagaimana model analisis wacana kritis dalam berita kriminal *Posmetro Padang* apakah supir truk semen di marjinalkan dalam berita ini. Teori yang digunakan Eriyanto dan metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang diunggulkan dalam berita tersebut adalah *jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar* sedangkan pihak yang dimarjinalisasikan adalah supir truk yang membawa semen yaitu pria bertato yang bernama Indra Jaya alias In Tato. Hal ini terlihat pada strategi inklusi *Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar* menjadi pihak yang sering dimunculkan atau dibicarakan. Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, perbedaannya antara penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terlihat pada objek yang dibahas. Penulis membahas berita politik pada surat kabar *Haluan Riau* sedangkan peneliti Silvia Permata Sari membahas berita kriminal pada surat *Posmetro Padang*.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan teori bagi peneliti selanjutnya jika membahas tentang teori Theo Van Leeuwen dalam surat kabar, serta diharapkan bisa memberikan masukan untuk seluruh jurnalis agar lebih bijak dalam menulis berita, dan sebagai bahan pengajaran dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kemudian secara praktis pembahasan ini dapat membantu masyarakat agar pemikiran mereka lebih luas lagi dalam melihat berita apabila ada pihak-pihak yang dirugikan dalam berita tersebut sehingga bisa

menelaah sendiri jika memahami penelitian ini, dan bagi semua jurnalis agar lebih bijak dalam menulis berita karena yang dirugikan disini adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan sehingga tidak ada keadilan bagi mereka.

1.1.2 Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian Analisis Wacana Theo van Leeuwen dalam berita Politik surat kabar *Haluan Riau*, yaitu :

1. Bagaimana teori Theo van Leeuwen strategi eksklusif dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*?
2. Bagaimana teori Theo van Leeuwen strategi inklusif dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisis, mengidentifikasi, menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi tentang teori Theo van Leeuwen strategi eksklusif dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*.
2. Mendeskripsikan, menganalisis, mengidentifikasi, menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi tentang teori Theo van Leeuwen strategi inklusif dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*.

1.3 Ruang Lingkup, Pembatasan Masalah, dan Penjelasan Istilah

1.3.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini berjudul “Analisis Wacana Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*”. Dalam buku Eriyanto (2000) terdapat para ahli yang mengemukakan beberapa teorinya untuk menganalisis wacana seperti, Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, Tony Trew, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. Van Dijk, dan Norman Fairclough. Penulis memilih teori Theo van Leeuwen dalam melakukan penelitian ini, Menurut Leeuwen dalam Eriyanto (2000:173) ada 3 strategi eksklusi ketika sesuatu, seseorang atau kelompok dikeluarkan dalam teks yaitu, (1) pasivasi, (2) nominalisasi, (3) penggantian anak kalimat, kemudian ada 7 strategi inklusi ketika sesuatu, seseorang atau kelompok ditampilkan dalam teks yaitu, (1) diferensiasi-indiferensiasi, (2) objektivasi-abstraksi, (3) nominasi-kategorisasi, (4) nominasi-identifikasi, (5) determinasi-indeterminasi, (6) asimilasi-individualisasi, dan (7) asosiasi-diasosiasi.

1.3.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, penulis membatasi penelitian yang berjudul “Analisis Wacana Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*”, pada teori analisis wacana Theo van Leeuwen, dengan unsur strategi eksklusi yaitu yaitu, (1) pasivasi, (2) nominalisasi, (3) penggantian anak kalimat dan strategi inklusi yaitu, (1) diferensiasi-indiferensiasi, (2) objektivasi-abstraksi, (3) nominasi-kategorisasi, (4) nominasi-identifikasi, (5) determinasi-indeterminasi, (6) asimilasi-individualisasi, dan (7) asosiasi-diasosiasi dalam berita politik surat kabar Harian *Kompas*.

Alasan penulis membatasi penelitian ini pada teori Theo van Leeuwen karena teori tersebut sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk

menunjukkan suatu peristiwa, kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam sebuah wacana pemberitaan. Selain itu pada teori Theo van Leeuwen aktor/pelaku atau peristiwa dalam berita dibahas didalamnya sedangkan teori analisis wacana dari para ahli yang lain tidak membahas aktor/pelaku dalam wacana, tetapi lebih menekankan pada penggunaan kosa kata pada wacana, kemudian penulis menggunakan teori Thoe van Leeuwen dalam buku Eriyanto karena dalam buku tersebut teori Theo van Leeuwen dibahas dengan bahasa yang mudah dimengerti beserta contoh pada setiap strategi.

1.3.3 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang penulis anggap perlu penjelasannya.

Adapun penjelasan itu antara lain :

1. Pasivasi adalah satu di antara strategi wacana eksklusi Theo van Leeuwen tentang bagaimana seorang pelaku atau kelompok tertentu atau dikeluarkan atau tidak disebutkan dari pembicaraan di dalam suatu wacana dengan tujuan untuk melindungi pelaku atau kelompok tersebut melalui kalimat dalam bentuk pasif.
2. Nominalisasi adalah strategi wacana yang berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”.
3. Penggantian anak kalimat, penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pelaku.
4. Strategi wacana diferensiasi-indiferensiasi, Indiferensiasi adalah suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara

mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas. Diferensiasi adalah suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas tetapi juga bisa dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam.

5. Strategi wacana objektivasi-abstraksi, Objektivasi adalah pelaku sosial ditampilkan dengan diberi petunjuk yang konkret, sedangkan abstraksi adalah pelaku sosial ditampilkan dengan diberi petunjuk yang abstrak dapat dikatakan menunjuk angka yang tidak jelas atau dengan membuat suatu abstraksi seperti ratusan, ribuan, atau banyak sekali.
6. Strategi wacana nominasi-kategorisasi, Nominasi adalah pemberitaan mengenai aktor (seseorang/kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, yang tidak ditampilkan secara jelas, sedangkan kategorisasi adalah pemberitaan mengenai aktor (seseorang/kelompok) atau mengenai suatu permasalahan yang ditampilkan secara jelas. Aktor tersebut ditampilkan apa adanya ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial. Kategori ini bisa bermacam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang: agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya.
7. Strategi wacana nominasi-identifikasi, Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas.
8. Strategi wacana determinasi-indeterminasi, Indeterminasi adalah aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, sedangkan determinasi adalah aktor yang tidak disebutkan secara jelas.

9. Strategi wacana asimilasi-individualisasi, Individualisasi adalah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya, asimilasi terjadi ketika didalam pemberitaan bukan kategori pelaku sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, melainkan komunitas, kelompok sosial dimana seorang tersebut berada.
10. Strategi wacana asosiasi-diasosiasi, Asosiasi adalah aktor atau suatu pihak tidak ditampilkan sendiri, tetapi dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar, sedangkan disosiasi adalah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri.

1.4 Anggapan Dasar, dan Teori

1.4.1 Anggapan Dasar

Berdasarkan objek yang diteliti penulis, terdapat 3 strategi eksklusi teori Theo van Leeuwen yaitu, (1) pasivasi, (2) nominalisasi, (3) penggantian anak kalimat, dan 7 strategi inklusi teori Theo van Leuween yaitu, (1) diferensiasi-indiferensiasi, (2) objektivasi-abstraksi, (3) nominasi-kategorisasi, (4) nominasi-identifikasi, (5) determinasi-indeterminasi, (6) asimilasi-individualisasi, dan (7) asosiasi-diasosiasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*.

1.4.2 Tahapan Teori

1. Pengertian Wacana

Tarigan dalam Djajasudarma (2010:4) wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tulis. Kridalaksana dalam Tarigan

(2009:24) menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian wacana berdasarkan pendapat para ahli diatas adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar, disampaikan secara lisan atau tulisan dapat direalisasikan dalam bentuk karangan, paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap.

2. Pengertian Analisis Wacana

Analisis wacana dalam arti paling sederhana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat. Dalam kaitannya dengan linguistik, Analisis Wacana (AW) adalah cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat atau klausa (Aliah Darma, 2014: 11).

3. Strategi Analisis Wacana Model Theo van Leeuwen

Pertama, proses pengeluaran, eksklusi (eksklusi), yakni apakah di dalam satu teks berita ada kelompok atau pelaku yang tidak disebutkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai di dalam proses eksklusi atau eksklusi tersebut. Proses ini secara tidak langsung dapat mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Kedua, proses pemasukan, inkusi (inklusi), yakni suatu proses yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak suatu kelompok itu ditampilkan atau disebutkan melalui pemberitaan. Baik proses eksklusi maupun inklusi tersebut

menggunakan apa yang disebut dengan strategi wacana. Dengan menggunakan kata, kalimat, informasi, atau susunan bentuk kalimat tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan dalam teks.

1. Eksklusi

Ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor (seseorang atau kelompok) dikeluarkan dalam pembicaraan. Eksklusi adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu atau tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana (Eriyanto, 2000:173).

a. Pasivasi

Pasivasi adalah satu di antara strategi wacana tentang bagaimana seorang pelaku atau kelompok tertentu atau dikeluarkan atau tidak disebutkan dari pembicaraan di dalam suatu wacana dengan tujuan untuk melindungi pelaku atau kelompok tersebut melalui kalimat dalam bentuk pasif. Melalui pemakaian kalimat pasif, pelaku atau kelompok dapat dihilangkan dalam suatu teks wacana (Eriyanto, 2000:174). Hal ini dapat dilihat pada kalimat dalam tabel berikut ini.

Contoh Pasivasi

Aktif	Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas
Pasif	Seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi

(Sumber : Eriyanto, 2000:174)

Pada kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Pelaku yakni polisi ditampilkan di dalam teks tersebut. Sebaliknya, pada kalimat kedua, polisi adalah aktor yang dihilangkan di dalam pemberitaan, sebab yang diutamakan

di dalam pemberitaan adalah objek, korban penembakan. Dampak tidak baik dari kalimat tersebut ada dua. Pertama, pelaku hilang dari pemberitaan. Wartawan dan khalayak pembaca lebih memperhatikan dan tertarik untuk melihat korban daripada pelaku. Padahal, seperti dalam pemberitaan penembakan tersebut, pelaku penembakan adalah hal yang sangat penting yang sebetulnya layak untuk diketahui oleh pembaca. Kedua, bentuk kalimat pasif yang menghilangkan pelaku dalam kalimat membuat pembaca tidak kritis. Orang hanya akan terfokus pada korban saja daripada pelaku sehingga pelaku dapat bersembunyi karena tidak mendapat perhatian secara kritis dari khalayak pembaca.

b. Nominalisasi

Nominalisasi adalah strategi wacana yang berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan pe- dan -an. Nominalisasi dapat menghilangkan pelaku yang seharusnya ada di dalam pemberitaan, hal ini berhubungan dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif (Eriyanto, 2000: 176).

Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif, selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja, yang menunjuk pada apa yang dilakukan (proses) oleh subjek. Apabila kita menggunakan kata menembak selalu membutuhkan dua pelaku, yaitu siapa yang menembak dan siapa yang tertembak. Kedua hal tersebut harus ada di dalam kalimat agar kalimat tersebut memiliki makna. Sebaliknya, kata benda yang tidak membutuhkan subjek, karena kata benda tersebut bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Misalnya, kata penembakan tidak membutuhkan kehadiran subejk, kata teresbut bisa berdiri sendiri untuk

menjelaskan mahasiswa yang meninggal. Hal ini dapat dilihat pada kalimat dalam tabel berikut ini.

Contoh Nominalisasi

Verba	Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas
Nominalisasi	Seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi.

(Sumber : Eriyanto, 2000:176)

Pada kalimat kedua, pelaku yang menembak (polisi) bisa dihilangkan dalam struktur kalimat ketika kata kerja diubah ke dalam bentuk kata benda. Nominalisasi bukan hanya menghilangkan posisi subjek yang melakukan penembakan, bahkan nominalisasi dapat mengubah makna kalimat ketika diterima oleh khalayak. Nominalisasi tidak membutuhkan subjek, karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa.

c. Penggantian Anak Kalimat

Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pelaku. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa, dengan memakai anak kalimat “untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa”, maka pelaku (polisi) bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks (Eriyanto, 2000:178). Perhatikan kalimat dalam tabel berikut ini.

Contoh Penggantian Anak Kalimat

Tanpa anak kalimat	Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas.
Anak kalimat	Untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, tembakan terpaksa dilepaskan. Akibatnya seorang mahasiswa tewas.

(Sumber : Eriyanto, 2000:178)

Pada kalimat pertama, peristiwa penembakan itu ditampilkan tanpa anak kalimat, sedangkan pada kalimat kedua, ditambahkan anak kalimat terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa polisi menembak mahasiswa? Jawaban pertanyaan tersebut adalah polisi melakukan penembakan tersebut untuk menghalau dan mengendalikan mahasiswa dan argumentasi ini disajikan di dalam kalimat dengan menempatkannya sebagai anak kalimat.

Pada kalimat kedua, penambahan anak kalimat tersebut bisa menghilangkan keberadaan subjek atau pelaku penembakan. Penulis atau wartawan umumnya percaya dan menganggap bahwa khalayak pembaca tahu siapa yang melepaskan tembakan. Oleh karena dianggap tahu dan untuk keefisien kata, polisi sebagai pelaku dihilangkan. Perubahan pada kalimat tersebut tidak mengubah maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh wartawan. Ada atau tidak adanya anak kalimat di dalam suatu pemberitaan tidak mempengaruhi atau mengubah maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh wartawan.

2. Inklusi

Eriyanto (2000:178) mengatakan menurut Leeuwen ada beberapa strategi wacana ketika seseorang atau kelompok orang ditampilkan dalam teks, yaitu sebagai berikut :

a. Diferensiasi-Indiferensiasi

Suatu peristiwa atau seorang pelaku bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi juga bisa dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau pelaku lain di dalam teks. Hadirnya (inklusi) peristiwa atau kelompok lain selain yang diberitakan tersebut menurut van Leeuwen, bisa menjadi penanda yang baik, bagaimana suatu kelompok atau peristiwa direpresentasikan di dalam teks. Penghadiran kelompok atau peristiwa lain, secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak baik dibandingkan dengan kelompok lain. Ini merupakan strategi wacana, bagaimana suatu kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih baik (Eriyanto, 2000: 180). Misalnya, di dalam pemberitaan mengenai demonstrasi buruh di dalam kalimat pada tabel berikut ini.

Contoh Indiferensiasi-diferensiasi :

Indiferensiasi	Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok.
Diferensiasi	Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh.

(Sumber : Eriyanto, 2000:179)

Pada kalimat pertama jelas dikatakan, para buruh mogok, sementara pada kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat kedua tersebut secara tidak langsung membedakan antara sikap para pekerja dengan sikap para direksi. Teks tersebut memarjinalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan para buruhlah yang bersikeras untuk

melakukan mogok kerja, di lain pihak para direksi ditampilkan sebagai perusahaan yang lebih manusiawi dengan menawarkan perundingan.

Dikatakan memarjinalkan, karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi pertama, (buruh yang masih mogok) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua (direksi yang meminta perundingan). Fakta seperti mengapa mereka mogok atau apa yang diinginkan oleh direksi tidak ditampilkan, akibatnya yang tergambar di dalam teks melalui perbedaan pandangan antara cara yang dianggap bagus dengan cara yang tidak dipandang tidak bagus. Diferensiasi sering menimbulkan prasangka tertentu, terutama dengan membuat garis batas antara pihak kita dengan pihak mereka, memarjinalkan pihak mereka dan menguntungkan pihak kita.

b. Objektivasi-Abstraksi

suatu peristiwa atau pelaku sosial ditampilkan dengan diberi petunjuk yang konkret ataukah sebaliknya ditampilkan secara abstraksi. Bandingkan, antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi berikut (Eriyanto, 2000:181). Berikut contoh kalimat yang membedakan antara objektivasi dengan abstraksi pada tabel berikut ini.

Contoh Objektivasi-Abstraksi :

Objektivasi	PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan.
Abstraksi	PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan.

(Sumber : Eriyanto, 2000:181)

Pada kalimat pertama, ditampilkan secara jelas berapa kali PKI melakukan pemberontakan, sementara pada kalimat kedua dengan membuat sesuatu yang

abstrak seperti kata “berulang-ulang”. Khalayak akan mempersepsikan secara berbeda antara yang disebut secara jelas dengan yang dibuat dengan bentuk abstraksi. Penyebutan dengan abstraksi, menurut van Leeuwen bukan disebabkan oleh ketidaktahuan wartawan mengenai informasi yang pasti, tetapi lebih dianggap sebagai strategi wacana wartawan untuk menampilkan sesuatu.

c. Nominasi-Kategorisasi

Dalam suatu pemberitaan mengenai pelaku sosial (seseorang atau kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering terjadi pilihan apakah pelaku tersebut ditampilkan apa adanya ataukah disebut secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku sosial tersebut. Kategorisasi ini bisa bermacam-macam, satu diantaranya yang menunjukkan ciri penting dari seseorang, bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya (Eriyanto, 2000:182). Perhatikan dua kalimat berikut pada tabel di bawah ini.

Contoh Nominasi-Kategorisasi :

Nominasi	Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang.
Kategorisasi	Seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang.

(Sumber : Eriyanto, 2000:182)

Kedua kalimat di atas memiliki maksud atau arti yang sama, yakni ada seorang laki-laki yang membawa obat-obatan terlarang dan ditangkap oleh polisi. Pemberian kategori berkulit hitam sama seklai tidak merupakantambahan informasi yang penting siapa sebetulnya laki-laki itu. Mengapa kategori berupa kulit yang ditonjolkan di dalam kalimat itu? Mengapa bukan warga negara dan yang lainnya?

Barangkali wartawan tidak secara sengaja menampilkan kategori berupa warna kulit, tetapi secara tidak langsung berita tersebut mengasosiasikan ke dalam pikiran khalayak bahwa warga yang berkulit hitam memang idenetik dengan kekerasan dan obat-obatan.

Menurut van Leeuwen, kategori yang ingin ditonjolkan di dalam pemberitaan bertujuan memberikan informasi yang berharga untuk mengetahui lebih dalam mengenai ideologi dari media bersangkutan. Kategori tersebut menunjukkan representasi bahwa suatu tindakan tertentu atau kegiatan tertentu menjadi ciri khas atau atribut yang selalu hadir sesuai dengan kategori yang bersangkutan. Misalnya, di Barat di dalam pemberitaan mengenai terorisme, kategori yang dipakai adalah Islam. Pelaku terorisme selalu diimbui dengan kata seperti beragama Islam atau muslimin atau mujahidin. Secara tidak langsung, seakan mengasosiasikan bahwa terorisme identik dengan warga Islam sehingga tidak ada yang aneh.

d. Nominasi-Identifikasi

Strategi identifikasi hampir sama dengan kategorisasi di dalam penerapannya, tetapi yang membedakan keduanya adalah di dalam pendefinisian tersebut dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Di sini ada dua proposisi, di mana pada proposisi kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama. Kalimat yang menggunakan strategi identifikasi, umumnya dihubungkan dengan kata hubung seperti yang dan di mana. Proposisi ke dua tersebut di dalam kalimat, posisinya murni sebagai penjelas atau identifikasi atas sesuatu.

Wartawan barangkali ingin memberikan penjelasan siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu. Pemberian penjelasan tersebut mensugestikan makna tertentu, karena umumnya berupa penilaian atas seseorang, kelompok atau tindakan tertentu. Ini merupakan suatu strategi wacana di mana satu orang, kelompok, atau tindakan, diberikan penjelasan yang buruk sehingga diterima oleh khalayak akan buruk pula (Eriyanto, 2000:183). Bandingkan dua kalimat berikut pada tabel di bawah ini.

Contoh Nominasi-Identifikasi :

Nominasi	Seorang wanita ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa.
Identifikasi	Seorang wanita, yang sering keluar malam, ditemukan tewas. Diduga sebelumnya diperkosa.

(Sumber : Eriyanto, 2000:185)

Anak kalimat yang sering keluar malam adalah identifikasi yang diberikan oleh wartawan. Identifikasi tersebut bisa menjadi penilaian ke arah mana peristiwa tersebut harus dijelaskan. Dengan memberi anak kalimat yang sering ke luar malam, secara tidak langsung wanita tersebut digambarkan secara buruk, tidak memiliki nilai moral dan etika yang baik, karena seharusnya wanita tidak baik ke luar malam sehingga tidak heran jika mengundang hasrat laki-laki untuk memperkosanya. Padahal, wanita tersebut keluar malam atau tidak bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa dia diperkosa. Sebagai kalimat penjelas, ada atau tidak adanya anak kalimat tersebut sama sekali tidak mempengaruhi arti kalimat yang memberitahukan ada wanita yang ditemukan tewas setelah sebelumnya diperkosa.

e. Determinasi-Indeterminasi

Di dalam pemberitaan, pelaku atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi sering juga tidak jelas (anonim). Anonimitas ini terjadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga karena ada ketakutan struktural jika kategori yang jelas dari seorang pelaku sosial tersebut disebut di dalam teks. Alasannya, dengan membentuk anonimitas tersebut, ada kesan yang berbeda ketika diterima oleh khalayak pembaca. Hal ini dikarenakan anonimitas menurut van Leeuwen justru membuat suatu generalisasi, tidak spesifik (Eriyanto, 2000:185). Berikut contoh kalimat yang membedakan antara determinasi dengan indeterminasi pada tabel di bawah ini.

Contoh Indeterminasi-Determinasi :

Indeterminasi	Menlu Alwi Shihab disebutsebut terlibat skandal bulog.
Determinasi	Orang dekat Gus Dur disebutsebut terlibat dalam skandal bulog.

(Sumber : Eriyanto, 2000:186)

Pada contoh kalimat di atas, kalimat pertama, nama pelaku sosial disebutkan secara jelas dan spesifik (Alwi Shihab). Pada kalimat kedua, pelaku sosial tidak disebutkan secara jelas dan spesifik sehingga tidak lagi bermakna tunggal melainkan bermakna jamak. Menegaskan bahwa ada beberapa orang memiliki hubungan dekat dengan Gus Dur yang terlibat kasus Bulog. Melalui indeterminasi, maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan kepada khalayak dapat diterima secara jelas, karena peristiwa yang ditampilkan dijelaskan secara spesifik. Berbeda dengan indeterminasi, determinasi justru memberikan gambaran yang samar atau tidak jelas di dalam suatu pemberitaan sehingga khalayak menemui kesulitan untuk menangkap maksud yang tersembunyi di dalamnya.

f. Asimilasi-Individualisasi

Strategi ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah pelaku sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi terjadi ketika di dalam pemberitaan bukan kategori pelaku sosial yang spesifik yang disebut di dalam berita, melainkan komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada (Eriyanto, 2000:187). Perhatikan kalimat dalam tabel berikut ini.

Contoh Individualisasi-Asimilasi :

Individualisasi	Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditembak Parman, seorang polisi, dalam demonstrasi di Cendana kemarin.
Asimilasi	Mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin.

(Sumber : Eriyanto, 2000:187)

Kalimat pertama adalah bentuk individualisasi, karena di sana kategori mahasiswa disebut secara jelas. Jika tidak disebutkan di dalam teks, berita tersebut tetap menegaskan bahwa yang meninggal dalam demonstrasi tersebut adalah satu orang mahasiswa. Hal ini berbeda bila dibandingkan pada kalimat kedua dalam bentuk asimilasi. Dalam kalimat tersebut, tidak disebut Adi (mahasiswa yang meninggal), tetapi yang diacu adalah komunitas yang bernama mahasiswa. Demikian juga dengan Parman yang disebut sebagai polisi. Bentuk kalimat kedua dengan menggunakan strategi wacana asimilasi, makna atau kesan yang diterima oleh khalayak akan berbeda dengan kalimat pertama. Melalui strategi wacana ini, digambarkan begitu banyak mahasiswa yang tertembak, mengesankan semua mahasiswa menjadi korban. Demikian hanya dengan polisi yang dikesankan semua polisi melakukan penembakan.

g. Asosiasi-Disosiasi

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah pelaku atau suatu pihak ditampilkan sendiri atau dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Elemen asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau pelaku sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Ini adalah proses yang sering terjadi tanpa kita sadari (Eriyanto, 2000:189).

Jika ada tentara menembak mahasiswa, khalayak pembaca bukan hanya menilai secara khusus kasus tersebut, tetapi juga menghubungkan dengan perilaku militer yang memang sering melakukan penembakan dan berjiwa militer. Jika ada pejabat yang bersangkutan terlibat dalam kasus Bulog, tetapi tidak diiperiksa, khalayak pembaca sering juga menghubungkan dengan peristiwa yang lain seperti Bank Bali. Tentu saja tidak ada hubungan antara kasus Bulog dengan kasus Bank Bali, namun secara imajinatif dapat dihubungkan secara literer bahwa ini menunjukkan watak atau pola pemerintah Indonesia yang tidak tegas pada para koruptor. Perhatikan contoh kalimat pada tabel di bawah ini.

Contoh Asosiasi-Diasosiasi :

Disosiasi	Sebanyak 40 orang muslim meninggal dalam kasus Tabelo, Galela, dan Jailolo.
Asosiasi	Umat Islam di mana-mana selalu menjadi sasaran pembantaian. Setelah di Bosnia, sekarang di Ambon. Sebanyak 40 orang meninggal dalam kasus Tabelo, Galela, dan Jailolo.

(Sumber : Eriyanto, 2000:190)

Pada kalimat pertama, umat Islam yang meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo tidak dihubungkan dengan kelompok yang lebih luas. Sementara

pada kalimat yang kedua, umat Islam yang meninggal diasosiasikan dan dihubungkan dengan umat Islam di negara-negara lain. Dengan memberikan asosiasi seperti itu, representasi mereka yang meninggal menjadi berbeda. Pada kalimat pertama, kasus Ambon tersebut dipandang sebagai kasus spesifik, lokal, dan berlaku hanya untuk wilayah Ambon. Sementara kalimat yang kedua justru sebaliknya, mereka yang meninggal dihubungkan atau diasosiasikan dengan mereka yang meninggal di Bosnia. Oleh karena itu, kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo tidak dianggap sebagai kasus lokal Ambon, tetapi juga kasus umat Islam secara keseluruhan.

Apa yang terjadi di Ambon secara tidak langsung diasosiasikan menggambarkan apa yang terjadi di dunia Islam secara keseluruhan. Umat Islam dipandang menjadi korban pembantaian, dengan demikian, strategi asosiasi membuat khalayak membayangkan dan menghubungkan secara imajiner dengan komunitas yang lebih luas. Kasus Ambon dan Bosnia adalah dua peristiwa yang terpisah, tetapi dengan asosiasi dapat dibuat hubungan imajiner di antara kedua peristiwa tersebut sehingga berhubungan.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa tiga strategi eksklusi dan tujuh strategi inklusi teori Theo van Leeuwen.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian perpustakaan atau *library Research*. Menurut Sutrisno Hadi (1990) dalam Nursapia (2014:68) disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, koran, dan lain sebagainya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berita politik surat kabar *Haluan Riau*.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analisis* / analisis isi, yang bersifat metode deskriptif. Metode analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk mengungkapkan studi tentang pers dalam skala besar, penelitian sosiologis dan linguistik, terutama media mutakhir (Alber, 2018:57). Menurut Weber dalam Meleong (2012:219-220), *conten analysis* (kajian isi) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.

1.5.2 Sumber Data

1. Sumber Data

Menurut Arikunto (2010:172) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua berita politik pada surat kabar *Haluan Riau*. Hal ini berhubungan dengan berita politik dalam surat kabar *Haluan Riau*. Penulis meneliti 25 surat kabar *Haluan Riau*.

2. Data

Data penelitian ini adalah semua berita politik dalam surat kabar *Haluan Riau* yang menggunakan strategi eksklusi dan inklusi teori Theo van Leeuwen yaitu strategi eksklusi (1) pasivasi, (2) nominalisasi, (3) penggantian anak kalimat. Strategi inklusi : (1) diferensiasi-indiferensiasi, (2) objektivasi-abstraksi, (3) nominasi-kategorisasi, (4) nominasi-identifikasi, (5) determinasi-indeterminasi, (6) asimilasi-individualisasi, dan (7) asosiasi-diasosiasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* sebanyak 25 surat kabar, penulis hanya meneliti berita politik yang terdapat dalam surat kabar *Haluan Riau*.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan hermeneutik. Kedua teknik ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

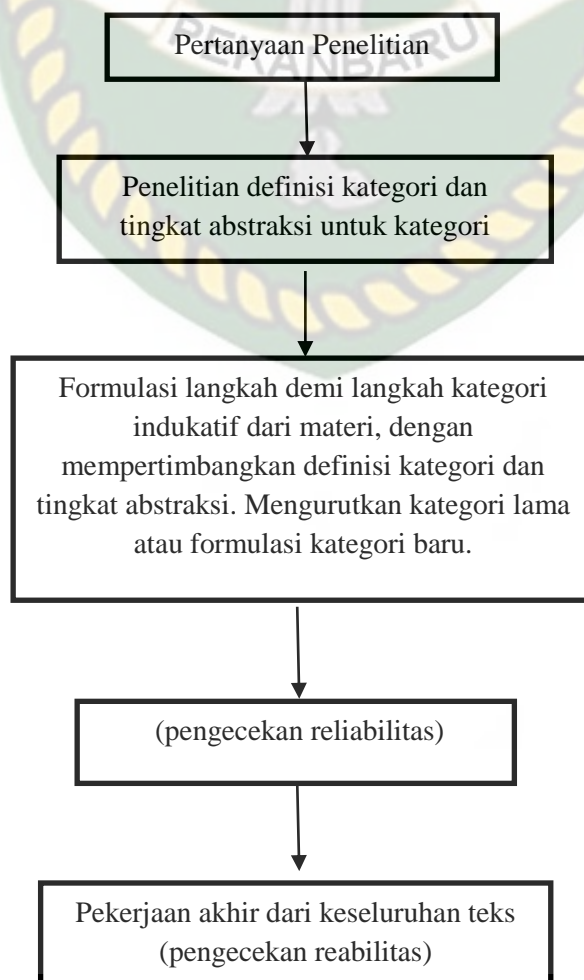
Teknik dokumentasi yaitu teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis dalam memperoleh data yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2015:329) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar *Haluan Riau* sebanyak 25 surat kabar.

2. Teknik Hermeneutik

Menurut Hamidy (2003: 24) teknik hermeneutik yakni teknik baca, catat dan disimpulkan. Teknik hermeneutik bertujuan untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data yang terdapat pada berita politik surat kabar *Haluan Riau* sebanyak 25 surat kabar. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam teknik penelitian ini yaitu penulis terlebih dahulu membaca setiap berita politik yang terdapat di dalam surat kabar *Haluan Riau*, kemudian penulis mencatat kalimat yang mengandung strategi eksklusi dan inklusi teori Theo van Leeuwen, terakhir penulis menyimpulkannya.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan analisis konten kualitatif, data penelitian ini disusun berdasarkan tahapan langkah-langkah yang terdapat dalam *content analysis* (kajian isi) dan dijabarkan melalui bagan berikut ini:



↓
Interprestasi hasil

Diadaptasi dari Mayring dalam Moleong (2014:222-223).

Pertama, pertanyaan peneliti. Pada tahap ini penulis merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana teori Theo van Leeuwen strategi eksklusi dan inklusi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*?

Kedua, penelitian defenisi dan tingkat abstraksi untuk kategori. Pada tahap ini penulis mendefenisikan teori Theo van Leeuwen strategi eksklusi dan inklusi, kemudian mengkategorikan data sesuai dengan strategi eksklusi yaitu, (1) pasivasi, (2) nominalisasi, (3) penggantian anak kalimat dan inklusi yaitu, (1) diferensiasi-indiferensiasi, (2) objektivasi-abstraksi, (3) nominasi-kategorisasi, (4) nominasi-identifikasi, (5) determinasi-indeterminasi, (6) asimilasi-individualisasi, dan (7) asosiasi-diasosiasi.

Ketiga, formulasi langkah demi langkah kategori dengan mempertimbangkan definisi kategori dan tingkat abstraksi. Pada tahap ini penulis mengurutkan kategori data sesuai dengan strategi eksklusi dan inklusi teori Theo van Leeuwen kemudian mengurutkan data sesuai strategi tersebut, didahului oleh data eksklusi kemudian data inklusi.

Keempat, pengecekan reliabilitas. Pada tahap ini penulis memastikan kembali apakah data telah sesuai dengan kategori yaitu strategi eksklusi dan inklusi dan pengecekan ini dilakukan secara berulang-ulang dan telah didiskusikan juga dengan pembimbing agar tidak ada kesalahan.

Kelima, pekerjaan akhir dari keseluruhan teks (pengecekan reabilitas). Pada tahap ini setelah penulis melakukan pengecekan data secara berkala dan menyeluruh kemudian penulis dapat melakukan tahap akhir yaitu interpretasi data.

Keenam, Interpretasi data. Pada tahap ini penulis memberikan pendapat, atau pandangan teoritis terhadap hasil analisis data yang penulis lakukan yaitu analisis wacana Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*.



BAB II PENGOLAHAN DATA

Bagian pengolahan data penulis membahas tentang deskripsi data, analisis data, dan interpretasi data. Selanjutnya mengenai peneitian ini penulis membahas tentang analisis wacana Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*.

2.1 Deskripsi Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan penulis dalam memperoleh data yang akurat tentang teori eksklusi dan inklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*, maka penulis mendeskripsikan teori eksklusi dan inklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*.

2.1.1 Teori Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*.

Tabel 1. Teori Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*.

No	Publikasi	Judul	Data	Keterangan
1	Selasa, 3 Desember 2019	APBD Riau 2019 Khawatir Target Tak Tercapai Realisasi di Bawah 70 Persen. (Lampiran 1, hal 85)	<i>Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setdaprov Riau, Indra mengatakan saat ini realisasi APBD masih berproses di ODP masing-masing.(1)</i>	Aktif
			<i>Dikhawatirkan target 75 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai 90 persen tidak tercapai.(1)</i>	Pasif
2	Jumat, 27 Desember	Kilas Balik Politik 2019	<i>Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai</i>	Aktif

	2019	Pertempuran, Korban Jiwa Hingga Lawan Jadi Kawan. (Lampiran 2, hal 86)	penyelenggara pemilu menyiapkan 813.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS).(2) Pemilu serentak 2019 <i>disebutkan</i> sebagai pemilu terbesar di dunia, bahkan terumit di dunia.(2)	Pasif
3	Senin, 30 Desember 2019	Selama 2019 ICW: Vonis Ringan Koruptor Marak. (Lampiran 3, hal 88)	<i>Menurut ICW</i> , Vonis ringan terhadap pelaku korupsi kembali terjadi pada 2019. (3) “Tidak bisa dibantah bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak lagi <i>dianggap</i> lembaga pemberi keadilan untuk kasus korupsi sejak ditinggal Artidjo Alkostar”.(3)	Aktif Pasif
4	Rabu, 8 Januari 2020	623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam. (Lampiran 5, hal 90)	<i>Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution</i> resmi melantik 623 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.(4) Berlarut-larutnya jadwal pelantikan itu menuai spekulasi, <i>diduga</i> ada perubahan nama-nama yang dilantik sebelum digelar.(4)	Aktif Pasif
5	Senin, 23 Desember 2019	Seleksi Pansel Hakim MK Dinilai Penuh Catatan Buruk. (Lampiran 6, hal 91)	<i>Pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK)</i> dari jalur Presiden menghasilkan 3 nama.(5) <i>Pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK)</i> dari jalur Presiden menghasilkan 3 nama. Sayangnya, kinerja Pansel selama sebulan itu <i>dinilai</i> dipenuhi catatan	Aktif Pasif

			buruk.(5)	
6	Selasa, 10 Desember 2019	Singgung Kasus Novel AHY Minta KPK tak Dilemahkan. (Lampiran 7, hal 92)	PKS meminta Presiden Jokowi berkomitmen untuk <i>menuntaskan</i> kasus tersebut agar tidak berlarut-larut.(6)	Verba
			“Pak Jokowi hutang mata Saudara Novel Baswedan. Sudah 2,5 tahun lebih kasus Novel Baswedan dan tidak jelas <i>penyelesaiannya</i> ”. (6)	Nominalisasi
7	Selasa, 3 Desember 2019	Jabatan Pesiden Dua Priode Sudah jadi Konvensi Internasional. (Lampiran 8, hal 93)	Menurut Fadli Zon wacana menambah jabatan presiden menjadi tiga periode sangat berbahaya.(7)	Tanpa anak kalimat
			Karena menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, seringkali <i>melakukan</i> perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU, sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntungkan.(7)	Anak kalimat

2.1.2 Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*.

Tabel 2. Data Teori Inklusi Theo van Leeuwen yang Terdapat dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*.

No	Publikasi	Judul	Data	Keterangan
1	Jumat, 6 Desember 2019	Tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Meranti Capai Rp 5,4 Miliar. (Lampiran 9, hal	“Biasanya tunggakan dibayar setiap bulan. Baru kali ini sampai tiga bulan. Angkanya mencapai Rp 5.430.000.000,” ungkapnya. (1)	Indiferensiasi

		94)	<p>“Biasanya tunggakan dibayar setiap bulan. Baru kali ini sampai tiga bulan. Angkanya mencapai Rp 5.430.000.000,” ungkapnya. Karena RSUD sudah menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), membuat operasionalnya terganggu. (1)</p>	Diferensiasi
2	Rabu, 11 Desember 2019	<p>Serapan Dana Kelurahan di Kuansing Sangat Rendah. <i>(Lampiran 10, hal 95)</i></p>	<p>Pemerintah kabupaten kuansing telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 12 miliar untuk 11 kelurahan di Kuansing pada APBD 2019. Namun hingga memasuki pertengahan Desember 2019, realisasinya masih minim hanya sekitar 10 persen. (2)</p>	Indiferensiasi
			<p>Pemerintah kabupaten kuansing telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 12 miliar untuk 11 kelurahan di Kuansing pada APBD 2019. Namun hingga memasuki pertengahan Desember 2019, realisasinya masih minim hanya sekitar 10 persen. <i>Dikatakan, rendahnya realisasi tersebut disebabkan ada beberapa aturan yang mungkin belum difahami secara detail oleh kelurahan sehingga hal seperti itu muncul semacam</i></p>	Diferensiasi

			keragu-raguan di pihak kelurahan itu sendiri untuk melaksanakannya. (2)	
3	Jumat, 27 Desember 2019	Kilas Balik Politik 2019 Pertempuran, Korban Jiwa Hingga Lawan Jadi Kawan. (Lampiran 2, hal 86)	Secara keseluruhan petugas Pemilu 2019 yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri. (3)	Indiferensiasi
			Secara keseluruhan petugas Pemilu 2019 yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri. <i>Selain rekapitulasi banyaknya surat suara, minimnya pelatihan serta pembekalan seputar aturan teknis administrasi mengenai proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak 2019, menjadi alasan petugas KPPS kelelahan hingga meninggal dunia.</i> (3)	Diferensiasi
4	Kamis, 26 Desember 2019	Belum Ada Niat Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci. (Lampiran 11, hal 96)	Dimana setiap tahunnya Riau hanya menerima Rp200 juta dari hotel bintang empat tersebut. (4)	Objektivasi
			Apa betul tak ada untung dan laba Aryaduta itu <i>tak sampai</i> Rp1 Milyar per tahun? Aulanya saja disewa	Abstraksi

			terus kok. (4)	
5	Selasa, 31 Desember 2019	Tersandung Kasus Korupsi Dua ASN Pemprov Riau Belum Dipecat. (Lampiran 12, hal 97)	Gubri mengungkapkan dari 1.800 orang pegawai yang belum lama ini dilakukan tes narkoba, terbukti 38 orang positif sebagai pengguna. (5)	Objektivasi
			“itu baru dari 1.800 orang yang kita tes. Padahal pegawai kita ada 12 ribu lebih. Asumsi saya mungkin bias <i>seratus lebih</i> pengguna narkoba”. (5)	Abstraksi
6	Kamis, 2 Januari 2020	Selalu Positif Narkoba, Brigadir Aldes Dipecat. (Lampiran 13, hal 98)	Meski sudah rutin dilakukan, masih ada saja anggotanya yang positif narkoba. Jumlahnya mencapai 8 orang. (6)	Objektivasi
			Aldes dipecat lantaran, <i>selalu</i> positif narkoba saat dilakukan tes urine.(6)	Abstraksi
7	Rabu, 8 Januari 2020	DPRD Riau Sayangkan Banyak Proyek 2019 tak Tuntas. (Lampiran 4, hal 89)	Dia membeberkan <i>ada tujuh proyek</i> yang mengalami keterlambatan pekerjaan. (7)	Objektivasi
			Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyayangkan <i>banyak proyek</i> Pemprov Riau yang pekerjaannya tidak selesai sampai akhir 2019 lalu. (7)	Abstraksi
8	Selasa, 3 Desember 2019	Jabatan Presiden Dua Priode Sudah jadi Konvensi Internasional. (Lampiran 8, hal 93)	Masa jabatan presiden 2 <i>periode</i> dan menurut dia sudah menjadi satu konvensi internasional dan perlu untuk regenerasi. (8)	Objektivasi
			Karena menurut Wakil	Abstraksi

			Ketua Umum Gerindra itu, <i>seringkali</i> melakukan perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU, sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntungkan. (8)	
9	Rabu, 8 Januari 2020	623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam. (Lampiran 5, hal 90)	Wagubri menegaskan, pihaknya telah melakukan tes urine terhadap <i>Aparatur Sipil Negara (ASN)</i> di lingkungan Pemprov Riau. (9)	Nominasi
			Bagi ASN yang <i>memiliki moralitas dan integritas</i> , tidak ada namanya posisi jabatan basah dan kering. (9)	Kategorisas
10	Jumat, 10 Januari 2020	Si garang dari KPU Akhirnya Terpeleset Juga dengan Suap. (Lampiran 14, hal 99)	Selama Pemilu 2019 <i>Wahyu Setiawan</i> adalah “jubir” komisi Pemilihan Umum. (10)	Nominasi
			<i>Wahyu yang kurus, jangkung dan beruban serta tak lepas dari kemeja batik dalam berbagai forum selalu tegar dan tangguh</i> ketika debat dan dipojokkan lawan dalam forum ILC tvOne misalnya. (10)	Kategorisasi
11	Kamis, 26 Desember 2019	Belum Ada Niat Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci. (Lampiran 11, 96)	Sementara itu, anggota DPRD Riau, menyayangkan rendahnya, deviden yang diberikan oleh Aryaduta. (11)	Nominasi
			Sementara itu, anggota DPRD Riau, menyayangkan	Identifikasi

			rendahnya, deviden yang diberikan oleh Aryaduta, sebagai salah satu hotel terbesar di Riau. (11)	
12	Selasa, 14 Januari 2020	Ngopi di Warung Saat Jam Kerja di Meranti Sebanyak 13 ASN & Honoer Terjaring Razia. (Lampiran 15, hal 100)	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Meranti merazia Aparatur Sipil Negara dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (12)	Nominasi
			Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Meranti merazia Aparatur Sipil Negara dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sedang bersantai di warung kopi saat jam kerja. (12)	Identifikasi
13	Rabu, 4 Desember 2019	Bamsloed Mundur Loyalis Sebut Ada Peran Utusan Presiden. (Lampiran 16, hal 101)	Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) akhirnya memutuskan untuk mundur dari pencalonan ketua umum Golkar. (13)	Indeterminasi
			Mundurinya Bamsoet dan rekonsiliasi itu disebut melibatkan utusan Presiden Joko Widodo. (13)	Determinasi
14	Senin, 30 Desember 2019	Kasus Novel Bukan Pidana Biasa TimAdvokasi: Ada Pemufakatan Jahat. (Lampiran 3, hal 88)	Peneliti dari ICW, Wana Alamsyah, mengatakan kasus penyiraman Novel bukanlah bentuk penganiyaan semata. (14)	Indeterminasi
			Selain itu, ada isu yng menyebutkan bahwa jendral terlibat dalam penyerangan	Determinasi

			Novel. (14)	
15	Senin, 9 Desember 2019	Libur ASN Bertambah, Ahmad Doli: Kenapa Harus Dibuat Empat Hari. (<i>Lampiran 17, hal 102</i>)	<i>Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Rudianto Sumarwono</i> meluruskan wacana tersebut. (15)	Individualisasi
			Dia mengatakan hal tersebut bukan berasal dari pihaknya, melainkan keinginan dari pihak <i>Kementrian PAN-RB</i> sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2019. (15)	Asimilasi
16	Jumat, 13 Desember 2019	Era Jokowi Mahfud Klaim tak Ada Pelanggaran HAM. (<i>Lampiran 18, hal 103</i>)	<i>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD</i> , mengklaim di bawah pemerintahan JokoWidodo tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat. (16)	Individualisasi
			Ada berdasarkan temuannya dari sejumlah kasus, ada <i>oknum aparat</i> cenderung kebablasan menangani suatu konflik atau aksi massa. (16)	Asimilasi
17	Selasa, 17 Desember 2019	Disebut Lakukan Pembohongan Publik Kabag Kesra: Kami tak Ada Anggaran untuk itu. (<i>Lampiran 19, hal 104</i>)	<i>Gubernur LSM-LIRA Riau, Herman Fadly yang kerap disapa Boma</i> , dikonfirmasi, Minggu (16/12), kembali mengulang pernyataanya.. (17)	Individualisasi
			<i>Kabag</i> jangan melakukan pembohongan publik, sebab hadiah umroh yang dijanjikan sampai sekarang belum direalisasikan juga. (17)	Asimilasi

18	Kamis, 19 Desember 2019	Bando Ilegal Masih Berdiri Pengamat Sebut Pemko Impoten. <i>(Lampiran 20, hal 105)</i>	<i>Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan</i> menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru impoten dan pengecut memotong bando-bando ilegal sampai saat ini masih berdiri di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. (18)	Individualisasi
			<i>Pemerintah Kota Pekanbaru</i> impoten dan pengecut memotong bando-bando legal sampai saat ini masih berdiri di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. (18)	Asimilasi
19	Senin, 30 Desember 2019	Kasus Novel Bukan Pidana Biasa TimAdvokasi: Ada Pemufakatan Jahat. <i>(Lampiran 3, hal 88)</i>	<i>Asfinawati</i> mengatakan, seharusnya pelaku dikenakan pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. (19)	Individualisasi
			<i>Dua oknum polisi</i> pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di jerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. (19)	Asimilasi
20	Selasa, 14 Januari 2020	Karoke Keluarga Jual Minol Satpol PP Jangan Panas di Awal Saja. <i>(Lampiran 21, hal 106)</i>	Hal itu disampaikan <i>Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri</i> , lantaran beberapa waktu lalu ada penemuan ratusan botol minuman alcohol yang didapat dari salah satu karoke keluarga. (20)	Individualisasi
			<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru</i> meminta kepada <i>Pemerintah Kota (Pemko)</i>	Asimilasi

			Pekanbaru untuk bersikap tegas dengan menerapkan sanksi terhadap tempat karaoke keluarga yang menjual minum beralkohol (minol). (20)	
21	Senin, 16 Desember 2019	Korupsi Dana Hibah di Bengkulu TA 2012 Berkas SA tak Kunjung Lengkap. (Lampiran 23, hal 108)	Penyidik, kata dia, masih melengkapi berkas perkara <i>Suhendri Asnan</i> . (21)	Disosiasi
			Diketahui, Suhendri Asnan ditetapkan sebagai tersangka <i>bersama oknum mantan DPRD Bengkulu lainnya, Yudhi Veryantoro</i> . (21)	Asosiasi
22	Selasa, 3 Desember 2019	Mantan Karyawan Garuda Buronan Korupsi Tiket Diringsus. (Lampiran 22, hal 107)	<i>Tutin Apriyani</i> (berhijab hitam) terpidana korupsi Tiket Garuda Jilid V di Denpasar Bali, saat berada di Kejati Riau. (22)	Disosiasi
			Diketahui <i>tutin Apriyani</i> terlihat korupsi pengadaan tiket <i>bersama dua rekannya, Suhaimin Nidhom, dan AA Istri Wahyuni, karyawan DP-SKD PT Garuda Bandara Ngurah Rai, Bali</i> .(22)	Asosiasi

2.2 Analisis Data

Pada analisis data terdapat dua teori pokok bahasan yang difokuskan dalam kajian analisis wacana Theo van Leeuwen yaitu teori eksklusi dan inklusi yang terdapat dalam berita politik surat kabar *Haluan*.

Berikut ini merupakan seluruh data yang mengandung teori eksklusi Theo van Leeuwen yang terdapat dalam berita politik *Haluan Riau*.

2.2.1 Teori Eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*.

Pada bagian ini penulis menganalisis teori eksklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*. Menurut Eriyanto (2000:173) teori eksklusi adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Teori ini adalah proses bagaimana suatu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan atau dikeluarkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Terdapat tiga strategi pada teori eksklusi Theo van Leeuwen ini yaitu, 1) pasivasi, 2) nominalisasi, dan 3) penggantian anak kalimat.

Teori eksklusi Theo van Leeuwen yang terdapat dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* dapat dilihat dalam data berikut ini :

2.2.1.1 Pasivasi

Pasivasi merupakan salah satu strategi wacana eksklusi tentang bagaimana seorang pelaku atau kelompok tertentu dikeluarkan atau tidak disebutkan dari pembicaraan di dalam suatu wacana dengan tujuan untuk melindungi pelaku atau kelompok tersebut melalui kalimat dalam bentuk pasif (Eriyanto, 2000:174).

Data 1

Aktif	Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setdaoriv Riau, Indra mengatakan saat ini realisasi APBD masih berproses di ODP masing-masing. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “APBD Riau 2019 Khawatir Target Tak Tercapai Realisasi di Bawah 70 Persen”,
-------	--

	Lampiran 1, hal 85)
Pasif	<i>Dikhawatirkan</i> target 75 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai 90 persen tidak tercapai. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “APBD Riau 2019 Khawatir Target Tak Tercapai Realisasi di Bawah 70 Persen”, Lampiran 1, hal 85)

Berdasarkan data 1, kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif tersebut merujuk kepada aktor pelaku “Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setdaoriv Riau” yang disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, tidak terdapat aktor di dalamnya, pemilihan bentuk pasif dalam kalimat kedua yang ditandai dengan kata *dikhawatirkan*, sesuai dengan ciri-ciri kalimat pasif yaitu predikatnya berimbuhan di-. Kalimat kedua di atas mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang menyebutkan bahwa target 75 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai 90 persen tidak tercapai. Lewat pemakaian kalimat pasif ini, aktor dapat tidak hadir dalam teks. Pembentukan kalimat pasif ini berdampak pada pemahaman makna isi berita. Perhatian yang disuguhkan media massa tersebut lebih menekankan pada objek berita, sebab yang lebih dipentingkan dalam berita ini adalah objek, yaitu target 75 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai 90 persen tidak tercapai, Pemprov Riau dimarjinalkan dalam pemberitaan ini karena masyarakat akan menganggap bahwa Pemprov Riau tidak mampu menyelesaikan tugasnya dalam mengolah anggaran APBD.

Data 2

Aktif	Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menyiapkan 813.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Surat Kabar
-------	---

	<p><i>Haluan Riau</i>, Publikasi Jumat, 27 Desember 2019 dengan Judul “Kilas Balik Politik 2019 Pertempuran, Korban Jiwa Hingga Lawan Jadi Kawan”, Lampiran 2, hal 86)</p>
Pasif	<p>Pemilu serentak 2019 <i>disebutkan</i> sebagai pemilu terbesar di dunia, bahkan terumit di dunia. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i>, Publikasi Jumat, 27 Desember 2019 dengan Judul “Kilas Balik Politik 2019 Pertempuran, Korban Jiwa Hingga Lawan Jadi Kawan”, Lampiran 2, hal 86)</p>

Berdasarkan data 2, kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif tersebut merujuk kepada, aktor pelaku “Komisi Pemilihan Umum (KPU)” yang disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, tidak terdapat aktor di dalamnya, pemilihan bentuk pasif dalam kalimat kedua yang ditandai dengan kata *disebutkan*, sesuai dengan ciri-ciri kalimat pasif yaitu predikatnya berimbuhan di-. Kalimat kedua di atas mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang menyebutkan bahwa pemilu 2019 sebagai pemilu terbesar dan terumit di dunia, sama sekali tidak disinggung siapakah sebenarnya yang menyebutkan hal tersebut. Lewat pemakaian kalimat pasif ini, aktor dapat tidak hadir dalam teks. Pembentukan kalimat pasif ini berdampak pada pemahaman makna isi berita. Perhatian yang disuguhkan media massa tersebut lebih menekankan pada objek berita, sebab yang lebih dipentingkan dalam berita ini adalah objek, yaitu Pemilu terbesar dan terumit di dunia, objek tersebut akan membuat masyarakat yang membaca berita itu akan maklum terhadap masalah kecurangan dan masalah lain yg terdapat di Pemilu. KPU dimarjinalkan dalam pemberitaan ini karena petugas KPU yang menjadi korban meninggal dunia karena

kelelahan dalam menghitung surat suara dan menjalankan Pemilu tahun 2020 akan dianggap wajar oleh masyarakat.

Data 3

Aktif	Menurut <i>ICW</i> , Vonis ringan terhadap pelaku korupsi kembali terjadi pada 2019. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 30 Desember 2019 dengan Judul “Selama 2019 ICW: Vonis Ringan Koruptor Marak”, Lampiran 3, hal 88)
Pasif	“Tidak bisa dibantah bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak lagi <i>dianggap</i> lembaga pemberi keadilan untuk kasus korupsi sejak ditinggal Artidjo Alkostar”. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 30 Desember 2019 dengan Judul “Selama 2019 ICW: Vonis Ringan Koruptor Marak”, Lampiran 3, hal 88)

Berdasarkan data 3, kalimat pertama disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif tersebut merujuk kepada aktor pelaku ”ICW (Indonesia Corruption Watch)” yang disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, tidak terdapat aktor di dalamnya, pemilihan bentuk pasif dalam kalimat kedua yang ditandai dengan kata “dianggap”, sesuai dengan ciri-ciri kalimat pasif yaitu predikatnya berimbuhan di-. Kalimat kedua di atas mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak lagi lembaga pemberi keadilan untuk kasus korupsi sejak ditinggal Artidjo Alkostar, sama sekali tidak disinggung siapakah sebenarnya yang menyebutkan hal tersebut. Lewat pemakaian kalimat pasif ini, aktor dapat tidak hadir dalam teks. Pembentukan kalimat pasif ini berdampak pada pemahaman makna isi berita.

Perhatian yang disuguhkan media massa tersebut lebih menekankan pada MA yang tidak lagi memberikan keadilan untuk kasus korupsi sejak ditinggal Artidjo Alkostar. MA dimarjinalkan dengan pernyataan “Mahkamah Agung (MA) tidak lagi lembaga pemberi keadilan untuk kasus korupsi sejak ditinggal Artidjo Alkostar”.

Data 4

Aktif	Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution resmi melantik 623 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 8 Januari 2020 dengan Judul “623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam”, Lampiran 5, hal 90)
Pasif	Berlarut-larutnya jadwal pelantikan itu menuai spekulasi, <i>diduga</i> ada perubahan nama-nama yang dilantik sebelum digelar. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 8 Januari 2020 dengan Judul “623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam”, Lampiran 5, hal 90)

Berdasarkan data 4, kalimat pertama disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif tersebut merujuk kepada aktor pelaku “Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution” yang disajikan dalam teks. Sebaliknya, kalimat kedua, tidak terdapat aktor didalamnya, pemilihan bentuk pasif dalam kalimat kedua yang ditandai dengan kata “diduga”, sesuai dengan ciri-ciri kalimat pasif yaitu predikatnya berimbuhan di-. Kalimat kedua mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang menyebutkan bahwa berlarut-larutnya jadwal pelantikan itu menuai spekulasi, ada perubahan nama-nama yang dilantik sebelum digelar, sama sekali tidak disinggung siapakah sebenarnya yang menyebutkan hal tersebut.

Perhatian yang disuguhkan media massa tersebut lebih menekankan pada berlarut-larutnya jadwal pelantikan yg menuai spekulasi, ada perubahan nama-

nama yang dilantik sebelum digelar. Hal tersebut membuat masyarakat yang membaca berita itu menganggap pemerintah melakukan kecurangan terhadap pelantikan 623 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pernyataan “Berlarut-larutnya jadwal pelantikan itu menuai spekulasi, *diduga* ada perubahan nama-nama yang dilantik sebelum digelar” memarjinalkan pemerintah.

Data 5

Aktif	Pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari jalur Presiden menghasilkan 3 nama. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 23 Desember 2019 dengan Judul “Seleksi Pansel Hakim MK Dinilai Penuh Catatan Buruk”, Lampiran 6, hal 91)
Pasif	Pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari jalur Presiden menghasilkan 3 nama. Sayangnya, kinerja Pansel selama sebulan itu <i>dinilai</i> dipenuhi catatan buruk. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 23 Desember 2019 dengan Judul “Seleksi Pansel Hakim MK Dinilai Penuh Catatan Buruk”, Lampiran 6, hal 91)

Berdasarkan data 5, kalimat pertama disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif tersebut merujuk kepada aktor pelaku “Pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK)” yang disajikan dalam teks. Sebaliknya, kalimat kedua, tidak terdapat aktor didalamnya, pemilihan bentuk pasif dalam kalimat kedua yang ditandai dengan kata “dinilai”, sesuai dengan ciri-ciri kalimat pasif yaitu predikatnya berimbuhan di-. Kalimat kedua mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang menyebutkan bahwa kinerja Pansel selama sebulan itu dipenuhi catatan buruk, sama sekali tidak disinggung siapa yang menyebutkan hal tersebut. Perhatian yang disuguhkan media massa tersebut lebih menekankan pada kinerja

Pansel yang buruk. Pernyataan yang tak bertuan itu memarjinalkan Pansel Mahkamah Agung karena dinilai buruk dalam melakukan pekerjaannya.

2.2.1.2 Nominalisasi

Nominalisasi adalah strategi wacana yang berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan pe- dan -an (Eriyanto, 2000: 176).

Data 6

Verba	PKS meminta Presiden Jokowi berkomitmen untuk <i>menuntaskan</i> kasus tersebut agar tidak berlarut-larut. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 10 Desember 2019 dengan Judul “Singgung Kasus Novel AHY Minta KPK tak Dilemahkan”, Lampiran 7, hal 92)
Nominalisasi	“Pak Jokowi hutang mata Saudara Novel Baswedan. Sudah 2,5 tahun lebih kasus Novel Baswedan dan tidak jelas <i>penyelesaiannya</i> ”. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 10 Desember 2019 dengan Judul “Singgung Kasus Novel AHY Minta KPK tak Dilemahkan”, Lampiran 7, hal 92)

Berdasarkan data 6, kalimat pertama pada kata “menuntaskan” merupakan verba/kata kerja, penulis merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam kajian ini penulis merujuk kamus luring. Menurut Depdiknas (2008:1568) menuntaskan v menghabiskan (mencurahkan semua). Kata kerja selalu membutuhkan subjek, yaitu “Presiden Jokowi” sebagai subjek dan “menuntaskan” sebagai kata kerja.

Sebaliknya kalimat kedua pada data 6 termasuk nominalisasi karena nominalisasi tidak membutuhkan subjek dan nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan/kegiatan yaitu kegiatan

“*menyelesaikan*” ditransformasikan/diubah menjadi kata benda/nomina sebagai peristiwa “*penyelesaian*”. Dalam hal ini penulis merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam kajian ini penulis merujuk kamus luring. Menurut Depdiknas (2008:1294) penyelesaian *n* adalah proses cara, perbuatan, menyelesaikan (dl berbagai-bagai arti spt pemberesan, pemecahan). Ketika telah diubah dalam bentuk nominal, tentu saja sudah terlepas dari konteks pelaku, waktu, dan tempat. Siapa yang lambat dan membuat kasus ini menjadi tidak jelas tidak ditekankan dalam berita. Novel Baswedan dimarjinalkan karena kasus yang menyimpannya tidak diselesaikan oleh pemerintah dan membuat kasus ini semakin tidak jelas.

2.2.1.3 Penggantian anak kalimat

Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor dalam pemberitaan (Eriyanto, 2000: 178). Artinya pemberitaan yang terdapat anak kalimat sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor, pemberitaan yang tidak melibatkan (menghilangkan) aktor atau pelaku sosial.

Data 7

Tanpa anak kalimat	Menurut Fadli Zon wacana menambah jabatan presiden menjadi tiga periode sangat berbahaya. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “Jabatan Presiden Dua Periode Sudah jadi Konvensi Internasional”, Lampiran 8, hal 93)
Anak Kaimat	Karena menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, seringkali <i>melakukan</i> perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU, sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntungkan. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “Jabatan Presiden

Berdasarkan data 7, kalimat pertama tanpa menggunakan anak kalimat, ditandai dengan kalimat tersebut hanya terdiri satu kalimat saja dan tertulis jelas aktor/pelaku pada kalimat tersebut yaitu “Fadli Zon” yang mengatakan kalau jabatan presiden menjadi tiga periode sangat berbahaya, sedangkan kalimat kedua tidak disebutkan aktor/pelaku/lembaga yang melakukan perubahan UU, ditandai dengan kalimat “seringkali melakukan perubahan itu” kalimat tersebut menghilangkan subjek pelaku yang merubah UU, seharusnya sebelum kata “melakukan” terdapat aktor tetapi pada kalimat tersebut dihilangkan dan diganti dengan anak kalimat yaitu “seringkali melakukan perubahan itu”. Wartawan umumnya percaya dan menganggap bahwa khalayak pembaca tahu siapa yang merubah UU tersebut. Karena dianggap tahu, dan untuk efisien kata itulah, dihilangkan subjek tersebut. Sekilas dengan perubahan ini tidak mengubah maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan tetapi kemungkinan tanpa disadari oleh penulisnya membuat siapa yang mengubah UU tersebut tersembunyi dalam kalimat dan masyarakat juga tidak terlalu menaruh perhatian terhadap siapa yang terlalu sering mengubah UU.

2.2.2 Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*.

Pada bagian ini penulis menganalisis teori inklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*. Menurut Eriyanto (2000:178) teori inklusi

adalah strategi wacana ketika seseorang atau kelompok orang ditampilkan dalam teks.

Teori inklusi Theo van Leeuwen yang terdapat dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* dapat dilihat dalam data berikut ini :

2.2.2.1 Diferensiasi-indiferensiasi

Suatu peristiwa atau seorang pelaku bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi juga bisa dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau pelaku lain di dalam teks (Eriyanto, 2000:179). Artinya diferensiasi yaitu melibatkan aktor/kelompok sosial dalam wacana dan aktor/kelompok sosial tersebut dibuat kontras, sedangkan diferensiasi pemberitaan yang melibatkan aktor/kelompok sosial dalam wacana tetapi secara mandiri tanpa melibatkan aktor lain.

Data 1

Indiferensiasi	“Biasanya tunggakan dibayar setiap bulan. Baru kali ini sampai tiga bulan. Angkanya mencapai Rp 5.430.000.000,” ungkapnya. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 6 Desember 2019 dengan Judul “Tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Meranti Capai Rp 5,4 Miliar”, Lampiran 9, hal 94)
Diferensiasi	“Biasanya tunggakan dibayar setiap bulan. Baru kali ini sampai tiga bulan. Angkanya mencapai Rp 5.430.000.000,” ungkapnya. Karena RSUD sudah menerapkan pola <i>Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)</i> , membuat operasionalnya terganggu. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 6 Desember 2019 dengan Judul “Tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Meranti Capai Rp 5,4 Miliar”, Lampiran 9, hal 94)

Berdasarkan data 1, kalimat pertama jelas dikatakan, “tunggakan sampai tiga bulan. Angkanya mencapai Rp 5.430.000.000”, tunggakan BPJS RSUD Meranti angkanya mencapai Rp 5.430.000.000 pihak Rumah Sakit juga sudah mengakuinya. Kalimat tersebut dikatakan indifferensiasi karena kalimat itu tidak melibatkan peristiwa atau aktor lain, ditandai dengan tidak adanya aktor lain yang dilibatkan dalam kalimat tersebut hanya “RSUD Meranti”.

Sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta “RSUD sudah menerapkan pola “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)”, membuat operasionalnya terganggu”. Kalimat kedua dikatakan sebagai diferensiasi karena menampilkan aktor lain didalamnya yaitu “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)” untuk disudutkan pihak RSUD Meranti. Kalimat kedua ini secara tidak langsung memarjinalkan PPK-BLUD dan menjadikan alibi tunggakan BPJS RSUD Meranti tersebut karena sudah menerapkan pola “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)” di RSUD Meranti. Pembaca berita yang tidak kritis akan menganggap pola PPK-BLUD malah merugikan pihak RSUD Meranti karena operasional mereka tidak bagus.

Data 2

Indifferensiasi	Pemerintah kabupaten kuansing telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 12 miliar untuk 11 kelurahan di Kuansing pada APBD 2019. Namun hingga memasuki pertengahan Desember 2019, realisasinya masih minim hanya sekitar 10 persen. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 11 Desember 2019 dengan Judul “Serapan Dana Kelurahan di Kuansing Sangat Rendah”, Lampiran 10, hal 95)
-----------------	--

Diferensiasi	Pemerintah kabupaten kuansing telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 12 miliar untuk 11 kelurahan di Kuansing pada APBD 2019. Namun hingga memasuki pertengahan Desember 2019, realisasinya masih minim hanya sekitar 10 persen. <i>Dikatakan, rendahnya realisasi tersebut disebabkan ada beberapa aturan yang mungkin belum difahami secara detail oleh kelurahan</i> sehingga hal seperti itu muncul semacam keragu-raguan di pihak kelurahan itu sendiri untuk melaksanakannya. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 11 Desember 2019 dengan Judul “Serapan Dana Kelurahan di Kuansing Sangat Rendah”, Lampiran 10, hal 95)
--------------	---

Berdasarkan data 2, kalimat pertama jelas dikatakan, “Pemerintah kabupaten Kuansing telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 12 miliar untuk 11 kelurahan di Kuansing pada APBD 2019. Namun hingga memasuki pertengahan Desember 2019, realisasinya masih minim hanya sekitar 10 persen”, realisasi APBD 2019 masih minim diterapkan Pemerintah Kabupaten Kuansing padahal telah memasuki akhir tahun. Kalimat tersebut dikatakan indifferensiasi karena kalimat itu tidak melibatkan peristiwa atau aktor lain didalamnya, hanya terdapat satu aktor/lembaga saja yaitu “Pemerintah Kabupaten Kuansing”.

Sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta “Dikatakan, rendahnya realisasi tersebut disebabkan ada beberapa aturan yang mungkin belum difahami secara detail oleh kelurahan sehingga hal seperti itu muncul semacam keragu-raguan di pihak kelurahan itu sendiri untuk melaksanakannya”. Kalimat kedua dikatakan sebagai diferensiasi karena menampilkan peristiwa didalamnya yaitu “ada beberapa aturan yang mungkin belum difahami secara detail oleh kelurahan sehingga hal seperti itu muncul semacam keragu-raguan di pihak kelurahan itu sendiri untuk melaksanakannya”. Terdapat aktor lain didalam kalimat tersebut yaitu

“kelurahan” dan terdapat peristiwa yang dijelaskan secara kontras yaitu masih ada yang belum difahami oleh kelurahan sehingga APBD 2019 realisasinya masih minim. Kalimat kedua ini secara tidak langsung memarjinalkan masyarakat karena harus memaklumi ketidakpahaman pihak kelurahan pada aturan Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk melaksanakan APBD 2019 padahal sudah memasuki akhir tahun. Dikatakan memarjinalkan masyarakat karena fakta aturan seperti apa yang tidak bisa di pahami 11 kelurahan itu sehingga butuh hampir satu tahun untuk memahaminya tidak ditampilkan dalam berita.

Data 3

Indiferensiasi	Secara keseluruhan petugas Pemilu 2019 yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 27 Desember 2019 dengan Judul “Kilas Balik Politik 2019 Pertempuran, Korban Jiwa Hingga Lawan Jadi Kawan”, Lampiran 2, hal 86)
Diferensiasi	Secara keseluruhan petugas Pemilu 2019 yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri. <i>Selain rekapitulasi banyaknya surat suara, minimnya pelatihan serta pembekalan seputar aturan teknis administrasi mengenai proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak 2019,</i> menjadi alasan petugas KPPS kelelahan hingga meninggal dunia. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 27 Desember 2019 dengan Judul “Kilas Balik Politik 2019 Pertempuran, Korban Jiwa Hingga Lawan Jadi Kawan”, Lampiran 2, hal 86)

Berdasarkan data 3, kalimat pertama jelas dikatakan, “Secara keseluruhan petugas Pemilu 2019 yang meninggal mencapai 554 orang”. Kalimat tersebut dikatakan indiferensiasi karena kalimat itu tidak melibatkan peristiwa lain didalam

nya, yaitu hanya peristiwa meninggalnya petugas Pemilu 2019, sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta “Selain rekapitulasi banyaknya surat suara, minimnya pelatihan serta pembekalan seputar aturan teknis administrasi mengenai proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak 2019, menjadi alasan petugas KPPS kelelahan hingga meninggal dunia”. Kalimat kedua dikatakan sebagai diferensiasi karena menampilkan peristiwa lain di dalamnya yaitu “Selain rekapitulasi banyaknya surat suara, minimnya pelatihan serta pembekalan seputar aturan teknis administrasi mengenai proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak 2019, menjadi alasan petugas KPPS kelelahan hingga meninggal dunia”.

Kalimat kedua ini secara tidak langsung memarjinalkan petugas KPPS karena alasan yang ditonjolkan dalam berita yaitu ketidakpawiaan petugas KPPS, minimnya pelatihan serta pembekalan seputar aturan teknis administrasi mengenai proses pemungutan dan perhitungan suara, seolah-olah wajar jika petugas KPPS kelelahan dan meninggal. Pemilu tahun ini pemerintah membuat pemilihan 5 surat suara sekaligus, yaitu calon presiden, anggota DPR, DPRD, hingga DPD, pemerintah harusnya sudah mempertimbangkan kebijakan yang mereka buat agar tidak terjadi hal seperti ini. Selain itu kecurangan-kecurangan yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 ini juga banyak, tetapi tidak di gubris oleh pemerintah, sehingga petugas KPPS mengambil kebijakan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

2.2.2.2 Objektivasi-abstraksi

Suatu peristiwa atau pelaku sosial ditampilkan dengan diberi petunjuk yang konkret ataukah sebaliknya ditampilkan secara abstraksi (Eriyanto, 2000:181).

Data 4

Objektivasi	Dimana setiap tahunnya Riau hanya menerima Rp200 juta dari hotel bintang empat tersebut. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 26 Desember 2019 dengan Judul “Belum Ada Niat Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci”, Lampiran 11, hal 96)
Abstraksi	Apa betul tak ada untung dan laba Aryaduta itu <i>tak sampai</i> Rp1 Milyar per tahun? Aulanya saja disewa terus kok. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 26 Desember 2019 dengan Judul “Belum Ada Niat Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci”, Lampiran 11, hal 96)

Berdasarkan data 4, dalam kalimat pertama disebutkan secara jelas “Riau hanya menerima Rp200 juta dari hotel bintang empat tersebut”, kalimat pertama disebut sebagai objektivasi karena frasa “Rp 200 juta” merupakan data konkret yang terdapat dalam kalimat tersebut, sementara kalimat kedua dengan membuat sesuatu yang abstrak seperti frasa “tak sampai”. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstrak. Masyarakat yang membaca berita akan memberikan persepsi yang berbeda-beda. Dengan pernyataan “Apa betul tak ada untung dan laba Aryaduta itu tak sampai Rp1 Milyar per tahun? Aulanya saja disewa terus kok” secara tidak langsung memarjinalkan Hotel Aryaduta yang hanya mampu membayar 200 juta kepada Riau padahal pendapatannya sangat besar hampir 1 Miliyar per tahun.

Data 5

Objektivasi	Gubri mengungkapkan dari 1.800 orang pegawai yang belum lama ini dilakukan tes narkoba, terbukti <i>38 orang positif</i> sebagai pengguna.
-------------	---

	(Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 31 Desember 2019 dengan Judul “Tersandung Kasus Korupsi Dua ASN Pemprov Riau Belum Dipecat”, Lampiran 12, hal 97)
Abstraksi	“itu baru dari 1.800 orang yang kita tes. Padahal pegawai kita ada 12 ribu lebih. Asumsi saya mungkin bisa <i>seratus lebih</i> pengguna narkoba”. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 31 Desember 2019 dengan Judul “Tersandung Kasus Korupsi Dua ASN Pemprov Riau Belum Dipecat”, Lampiran 12, hal 97)

Berdasarkan data 5, dalam kalimat pertama disebut secara jelas berapa banyak yang terbukti positif narkoba yaitu sebanyak 38 orang, disebut sebagai objektivasi karena “38 orang” merupakan data konkret yang terdapat dalam kalimat tersebut, sementara dalam kalimat kedua dengan membuat sesuatu yang abstrak seperti frasa “seratus lebih”. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstrak. Masyarakat yang membaca berita akan memberikan persepsi yang berbeda-beda. Dengan pernyataan “Padahal pegawai kita ada 12 ribu lebih. Disebut abstrak karena “12 ribu lebih” merupakan data yang abstrak dan tidak pasti berapa jumlah yang sebenarnya. Asumsi saya mungkin bisa *seratus lebih* pengguna narkoba” secara tidak langsung memarjinalkan ASN karena pernyataan Gubernur Riau tersebut membuat asumsi publik sebagian besar ASN pengguna narkoba.

Data 6

Objektivasi	Meski sudah rutin dilakukan, masih ada saja anggotanya yang positif narkoba. Jumlahnya mencapai 8 orang . (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 2 Januari 2020 dengan Judul “Selalu Positif Narkoba, Brigadir Aldes Dipecat”, Lampiran 13, hal 98)
Abstraksi	Aldes dipecat lantaran, <i>selalu</i> positif narkoba saat dilakukan tes urine. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 2 Januari 2020 dengan

	Judul “Selalu Positif Narkoba, Brigadir Aldes Dipecat”, Lampiran 13, hal 98)
--	--

Berdasarkan data 6, dalam kalimat pertama disebut secara jelas berapa banyak yang terbukti positif narkoba yaitu sebanyak 8 orang, disebut sebagai objektivasi karena “8 orang” merupakan data konkret yang terdapat dalam kalimat tersebut, sementara dalam kalimat kedua dengan membuat sesuatu yang abstrak seperti kata “selalu”. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstrak. Masyarakat yang membaca berita akan memberikan persepsi yang berbeda-beda. Dengan pernyataan “Aldes dipecat lantaran, *selalu* positif narkoba saat dilakukan tes urine.” secara tidak langsung memarjinalkan Aldes karena bukan berarti wartawan tidak mengetahui berapa kali Aldes melakukan tes urin, tetapi kata “selalu” dipakai untuk menggambarkan Aldes secara buruk.

Data 7

Objektivasi	Dia membeberkan <i>ada tujuh proyek</i> yang mengalami keterlambatan pekerjaan. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 8 Januari 2020 dengan Judul “DPRD Riau Sayangkan Banyak Proyek 2019 tak Tuntas”, Lampiran 4, hal 89)
Abstraksi	Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyayangkan <i>banyak proyek</i> Pemprov Riau yang pekerjaannya tidak selesai sampai akhir 2019 lalu. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 8 Januari 2020 dengan Judul “DPRD Riau Sayangkan Banyak Proyek 2019 tak Tuntas”, Lampiran 4, hal 89)

Berdasarkan data 7, dalam kalimat pertama disebutkan berapa banyak proyek yang mengalami keterlambatan pekerjaan yaitu sebanyak tujuh proyek, disebut sebagai objektivasi karena “tujuh proyek” merupakan data konkret yang terdapat dalam kalimat tersebut, sementara dalam kalimat kedua dengan membuat sesuatu yang abstrak seperti kata “banyak”. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstrak. Masyarakat yang membaca berita akan memberikan persepsi yang berbeda-beda. Dengan pernyataan “Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyayangkan banyak proyek Pemprov Riau yang pekerjaannya tidak selesai sampai akhir 2019 lalu”, secara tidak langsung memarjinalkan Pemprov Riau karena kata banyak tersebut menggiring opini publik menganggap Pemprov Riau tidak peduli terhadap pembangunan di Riau.

Data 8

Objektivasi	Masa jabatan presiden 2 periode dan menurut dia sudah menjadi satu konvensi internasional dan perlu untuk regenerasi. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “Jabatan Presiden Dua Periode Sudah jadi Konvensi Internasional”, Lampiran 8, hal 93)
Abstraksi	Karena menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, sering kali melakukan perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU, sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntungkan. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “Jabatan Presiden Dua Periode Sudah jadi Konvensi Internasional”, Lampiran 8, hal 93)

Berdasarkan data 8, dalam kalimat pertama disebut objektivitas karena secara jelas disebutkan masa jabatan presiden “2 periode”, ”2 periode” merupakan

data konkret yang disajikan dalam kalimat tersebut, sementara dalam kalimat kedua disebut abstraksi karena terdapat frasa “sering kali”. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstrak. Masyarakat yang membaca berita akan memberikan persepsi yang berbeda-beda. Dengan pernyataan “Wakil Ketua Umum Gerindra itu, *sering kali* melakukan perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU, sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntungkan”, secara tidak langsung memarjinalkan Pemerintah karena kata “seringkali” tersebut menggiring opini publik menganggap bahwa perubahan UU dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu.

2.2.2.3 Nominasi-kategorisasi

Dalam suatu pemberitaan mengenai pelaku sosial (seseorang atau kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering terjadi pilihan apakah pelaku tersebut ditampilkan apa adanya ataukah disebut secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku sosial tersebut. Kategorisasi ini bisa bermacam-macam, satu diantaranya yang menunjukkan ciri penting dari seseorang, bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategorisasi tersebut sebetulnya tidak penting, karena umumnya tidak mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak (Eriyanto, 2000:182).

Data 9

Nominasi	Wagubri menegaskan, pihaknya telah melakukan tes urine terhadap <i>Aparatur Sipil Negara (ASN)</i> di lingkungan Pemprov Riau. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 8 Januari 2020 dengan Judul “623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam”, Lampiran 5, hal 90)
----------	---

Kategorisasi	Bagi <i>ASN yang memiliki moralitas dan integritas</i> , tidak ada namanya posisi jabatan basah dan kering. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 8 Januari 2020 dengan Judul “623 Pejabat Pemprov Dilantik Molor Hampir Dua Jam”, Lampiran 5, hal 90)
--------------	--

Berdasarkan data 9, Kalimat pertama disebut sebagai nominasi karena merujuk kepada kata “ASN (Aparatur Sipil Negara)” yang terdapat pada kalimat, pada kata tersebut tidak ada penambahan kategori lagi di depan kata “ASN”, sedangkan kalimat kedua diberikan kategori “moralitas dan integritas” sama sekali tidak merupakan penambahan yang berguna karena seharusnya seluruh ASN sudah memiliki sikap seperti itu tanpa harus disebutkan. Kategori berupa sikap tersebut secara tidak langsung mengasosiasikan ke dalam benak khalayak bahwa tidak semua ASN bersikap seperti itu, memiliki moral dan integritas. ASN dimarjinalkan dalam berita ini.

Data 10

Nominasi	Selama Pemilu 2019 <i>Wahyu Setiawan</i> adalah “jubir” komisi Pemilihan Umum. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 10 Januari 2020 dengan Judul “Si garang dari KPU Akhirnya Terpeleset Juga dengan Suap”, Lampiran 14, hal 99)
Kategorisasi	<i>Wahyu yang kurus, jangkung dan beruban serta tak lepas dari kemeja batik dalam berbagai forum selalu tegar dan tangguh</i> ketika debat dan dipojokkan lawan dalam forum ILC tvOne misalnya. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 10 Januari 2020 dengan Judul “Si garang dari KPU Akhirnya Terpeleset Juga dengan Suap”, Lampiran 14, hal 99)

Berdasarkan data 10, Kalimat pertama dikatakan nominalisasi karena merujuk kepada nama “Wahyu Setiawan” yang terdapat pada kalimat pertama

tanpa ada penambahan kategori lagi di depan kata “Wahyu Setiawan” tersebut, sedangkan kalimat kedua disebut kategorisasi karena terdapat tambahan kategori pada nama Wahyu tersebut menjadi “Wahyu yang kurus, jangkung dan beruban serta tak lepas dari kemeja batik dalam berbagai forum selalu tegar dan tangguh” sama sekali tidak merupakan penambahan yang berguna. Kategori yang ditonjolkan berupa bentuk fisik Wahyu yaitu “kurus, jangkung dan beruban serta tak lepas dari kemeja batik” secara tidak langsung berita itu mengasosiasikan ke dalam benak khalayak bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari fisiknya saja, Wahyu yang rapi, berwibawa dalam berbagai acara di televisi itu ternyata terlibat suap.

2.2.2.4 Nominasi-identifikasi

Strategi identifikasi hampir sama dengan kategorisasi di dalam penerapannya, tetapi yang membedakan keduanya adalah di dalam pendefinisian tersebut dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas (Eriyanti, 2000:184).

Data 11

Nominasi	Sementara itu, anggota DPRD Riau, menyayangkan rendahnya, deviden yang diberikan oleh <i>Aryaduta</i> . (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 26 Desember 2019 dengan Judul “Belum Ada Niat Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci”, Lampiran 11, hal 97)
Identifikasi	Sementara itu, anggota DPRD Riau, menyayangkan rendahnya, deviden yang diberikan oleh Aryaduta, <i>sebagai salah satu hotel terbesar di Riau</i> . (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 26 Desember 2019 dengan Judul “Belum Ada Niat Baik Tambah Deviden Pemprov Surati Lippo Karawaci”, Lampiran 11, hal 97)

Berdasarkan data 11, kalimat pertama dikatakan nominalisasi karena “Aryaduta” merupakan nama tempat, nama tempat termasuk kedalam nomina, kata “Aryaduta” tidak terdapat keterangan dan penabahan anak kalimat untuk menerangkan lebih tentang “Aryaduta” tersebut, sedangkan kalimat kedua terdapat anak kalimat “sebagai salah satu hotel terbesar di Riau” adalah identifikasi yang diberikan oleh wartawan identifikasi tersebut bisa menjadi penilaian kearah mana peristiwa tersebut harus di jelaskan. Dengan memberi anak kalimat “sebagai salah satu hotel terbesar di Riau”, hotel Aryaduta dimarjinalkan dalam berita ini, masyarakat akan menganggap hotel Aryaduta buruk karena memberikan deviden yang rendah ke Riau, padahal hotel Aryaduta merupakan salah satu hotel terbesar di Riau.

Data 12

Nominasi	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Meranti merazia Aparatur Sipil Negara dan <i>pegawai honorer</i> di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 14 Januari 2020 dengan Judul “Ngopi di Warung Saat Jam Kerja di Meranti Sebanyak 13 ASN & Honoer Terjaring Razia”, Lampiran 15, hal 100)
Identifikasi	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Meranti merazia Aparatur Sipil Negara dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>yang sedang bersantai</i> di warung kopi saat jam kerja. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 14 Januari 2020 dengan Judul “Ngopi di Warung Saat Jam Kerja di Meranti Sebanyak 13 ASN & Honoer Terjaring Razia”, Lampiran 15, hal 100)

Berdasarkan data 12, kalimat pertama dikatakan nominalisasi karena “pegawai honorer” merupakan nama sebuah profesi yang termasuk dalam kelas

kata nomina, “pegawai honorer” tidak terdapat anak kalimat sebagai penambah keterangan, sedangkan kalimat kedua terdapat anak kalimat “pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sedang bersantai” adalah identifikasi yang diberikan oleh wartawan. Akan tetapi, identifikasi tersebut bisa menjadi penilaian kearah mana peristiwa tersebut harus di jelaskan. Dengan memberi anak kalimat “yang sedang bersantai”, Aparatur Sipil Negara digambarkan semakin buruk dan tidak merasa bersalah karena pergi ke warung kopi saat jam kerja.

2.2.2.5 Determinasi-indeterminasi

Di dalam pemberitaan, pelaku atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi sering juga tidak jelas (anonim).Anonimitas ini terjadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim.Bisa juga karena ada ketakutan struktural jika kategori yang jelas dari seorang pelaku sosial tersebut disebut di dalam teks (Eriyanto, 2000:186).

Data 13

Indeterminasi	Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsuet) akhirnya memutuskan untuk mundur dari pencalonan ketua umum Golkar. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 4 Desember 2019 dengan Judul “Bamsuet Mundur Loyalis Sebut Ada Peran Utusan Presiden”, Lampiran 16, hal 101)
Determinasi	Mundurinya Bamsuet dan rekonsiliasi itu disebut melibatkan utusan Presiden Joko Widodo . (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Rabu, 4 Desember 2019 dengan Judul “Bamsuet Mundur Loyalis Sebut Ada Peran Utusan Presiden”, Lampiran 16, hal 101)

Berdasarkan data 13, kalimat pertama dikatakan indeterminasi karena nama “Bambang Soesatyo” ditunjukkan secara spesifik dan disebut secara gambling dalam kalimat tersebut, sedangkan pada kalimat kedua dikatakan determinasi karena “utusan Presiden Joko Widodo” tidak lagi bermakna tunggal, tetapi jamak. Mengesankan bahwa ada beberapa orang “utusan Presiden Joko Widodo” yang terlibat dalam kasus mundurnya Bamsuet dari pencalonan ketua umum Golkar. Presiden Joko Widodo di marjinalkan dalam pemberitaan ini.

Data 14

Indeterminasi	<i>Peneliti dari ICW, Wana Alamsyah</i> , mengatakan kasus penyiraman Novel bukanlah bentuk penganiyaan semata. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 30 Desember 2019 dengan Judul “Kasus Novel Bukan Pidana Biasa TimAdvokasi: Ada Pemufakatan Jahat”, Lampiran 3, hal 88)
Determinasi	Selain itu, ada isu yng menyebutkan bahwa <i>jendral</i> terlibat dalam penyerangan Novel. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 30 Desember 2019 dengan Judul “Kasus Novel Bukan Pidana Biasa TimAdvokasi: Ada Pemufakatan Jahat”, Lampiran 3, hal 88)

Berdasarkan data 14, kalimat pertama dikatakan indeterminasi karena nama “Peneliti dari ICW, Wana Alamsyah” ditunjukkan secara spesifik dan disebut secara gamblang pada kalimat tersebut, sedangkan pada kalimat kedua dikatakan determinasi karena kata “jendral”, mengesankan bahwa ada seorang jendral yang terlibat dalam kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan di marjinalkan dalam berita ini karena tidak ada kejelasan dari kasusnya tersebut dan pelaku juga masih anonym.

2.2.2.6 Asimilasi-individualisasi

Strategi ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah pelaku sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi terjadi ketika di dalam pemberitaan bukan kategori pelaku sosial yang spesifik yang disebut di dalam berita, melainkan komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada (Eriyanto, 2000:187).

Data 15

Individualisasi	Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Rudianto Sumarwono meluruskan wacana tersebut. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 9 Desember 2019 dengan Judul “Libur ASN Bertambah, Ahmad Doli: Kenapa Harus Dibuat Empat Hari”, Lampiran 17, hal 102)
Asimilasi	Dia mengatakan hal tersebut bukan berasal dari pihaknya, melainkan keinginan dari pihak Kementrian PAN-RB sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2019. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 9 Desember 2019 dengan Judul “Libur ASN Bertambah, Ahmad Doli: Kenapa Harus Dibuat Empat Hari”, Lampiran 17, hal 102)

Berdasarkan data 15, kalimat pertama adalah individualisasi, karena merujuk kepada kata “Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Rudianto Sumarwono” disebutkan secara jelas dan gamblang dalam berita, maksudnya secara gamblang berita langsung menyebutkan nama si aktor/pelaku yaitu “Rudi Sumarwono” sehingga pembaca langsung mengenali aktor/pelaku yang dimaksudkan oleh penulis berita. Kalimat kedua tidak disebutkan nama pihak Kementrian PAN-RB tetapi yang diacu adalah lembaga yang bernama “Kementrian PAN-RB”. Tidak disebutkan siapa aktor/pelaku yang ada didalam “Kementrian PAN-RB”, tidak semua pembaca tahu kementrian PAN-RB. “Kementrian PAN-RB” dimarjinalkan

dalam pemberitaan ini karena seolah “Kementrian PAN-RB” ngotot ingin menambah libur ASN.

Data 16

Individualisasi	<i>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD</i> , mengklaim di bawah pemerintahan JokoWidodo tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Jumat, 13 Desember 2019 dengan Judul “Era Jokowi Mahfud Klaim tak Ada Pelanggaran HAM”, Lampiran 18, hal 103)
Asimilasi	Ada berdasarkan temuannya dari sejumlah kasus, ada <i>oknum aparat</i> cenderung kebablasan menangani suatu konflik atau aksi massa. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 9 Desember 2019 dengan Judul “Libur ASN Bertambah, Ahmad Doli: Kenapa Harus Dibuat Empat Hari”, Lampiran 18, hal 103)

Berdasarkan data 16, kalimat pertama adalah individualisasi, karena kategori “Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD” disebutkan secara jelas, maksudnya secara jelas berita langsung menyebutkan nama si aktor/pelaku yaitu “Mahfud MD” sehingga pembaca langsung mengenali aktor/pelaku yang dimaksudkan oleh penulis berita. Kalimat kedua disebut asimilasi karena tidak disebutkan oknum aparat yang cenderung kebablasan menangani suatu konflik atau aksi masa tetapi yang diacu hanya ”oknum aparat”. Asimilasi pada dasarnya akan menimbulkan efek generalisasi seperti kata “oknum aparat” dapat menimbulkan imajinasi tersendiri bagi pembaca oknum aparat mana yang cenderung kebablasan menangani suatu konflik atau aksi massa.

Data 17

Individualisasi	Gubernur LSM-LIRA Riau, Herman Fadly yang kerap disapa Boma , dikonfirmasi, Minggu (16/12), kembali mengulang pernyataanya. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 17 Desember 2019 dengan Judul “Disebut Lakukan Pembohongan Publik Kabag Kesra: Kami tak Ada Anggaran untuk itu”, Lampiran 19, hal 104)
Asimilasi	Kabag Kesra jangan melakukan pembohongan publik, sebab hadiah umroh yang dijanjikan sampai sekarang belum direalisasikan juga. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 17 Desember 2019 dengan Judul “Disebut Lakukan Pembohongan Publik Kabag Kesra: Kami tak Ada Anggaran untuk itu”, Lampiran 19, hal 104)

Berdasarkan data 17, kalimat pertama adalah individualisasi, karena kategori “Gubernur LSM-LIRA Riau, Herman Fadly yang kerap disapa Boma” disebutkan secara jelas, maksudnya secara jelas berita langsung menyebutkan nama si aktor/pelaku yaitu “Herman Fadly” sehingga pembaca langsung mengenali aktor/pelaku yang dimaksudkan oleh penulis berita. Kalimat kedua disebut asimilasi karena tidak disebutkan siapa orang dari bagian Kabag Kesra yang melakukan pembohongan publik, sebab hadiah umroh yang dijanjikan sampai sekarang belum direalisasikan juga. Asimilasi pada dasarnya akan menimbulkan efek generalisasi seperti kata “Kabag Kesra” dapat menimbulkan imajinasi tersendiri bagi pembaca bahwa Kabag Kesra tidak becus dalam melaksanakan tugasnya dan telah melakukan pembohongan publik.

Data 18

Individualisasi	Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru impoten dan pengecut memotong bando-bando ilegal sampai saat ini masih berdiri di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 19 Desember 2019 dengan Judul “Bando Ilegal Masih Berdiri
-----------------	--

	Pengamat Sebut Pemko Impoten”, Lampiran 20, hal 105)
Asimilasi	Pemerintah Kota Pekanbaru impoten dan pengecut memotong bando-bandoi legal sampai saat ini masih berdiri di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, 19 Desember 2019 dengan Judul “Bando Ilegal Masih Berdiri Pengamat Sebut Pemko Impoten”, Lampiran 20, hal 105)

Berdasarkan data 18, kalimat pertama adalah individualisasi, karena kategori “Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan” disebutkan secara jelas, maksudnya secara jelas berita langsung menyebutkan nama si aktor/pelaku yaitu “Mardianto Manan” sehingga pembaca langsung mengenali aktor/pelaku yang dimaksudkan oleh penulis berita. Kalimat kedua disebut asimilasi karena tidak disebutkan secara jelas “Pemerintah Kota Pekanbaru” bagian apa yang impoten dan pengecut tidak becus menangani bando-bando ilegal yang sampai saat ini masih berdiri di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Asimilasi pada dasarnya akan menimbulkan efek generalisasi seperti kata “Pemerintah Kota Pekanbaru” dapat menimbulkan imajinasi tersendiri bagi pembaca bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak becus dalam melaksanakan tugasnya.

Data 19

Individualisasi	Asfinawati mengatakan, seharusnya pelaku dikenakan pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, Senin, 30 Desember 2019 dengan Judul “Kasus Novel Bukan Pidana Biasa TimAdvokasi: Ada Pemufakatan Jahat”, Lampiran 3, hal 88)
Asimilasi	Dua oknum polisi pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di jerat pasal pengeroyokan dan penganiyayaan. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Kamis, Senin, 30 Desember 2019 dengan Judul “Kasus Novel Bukan Pidana Biasa

	TimAdvokasi: Ada Pemufakatan Jahat”, Lampiran 3, hal 88)
--	--

Berdasarkan data 19, kalimat pertama adalah individualisasi, karena “Asfinawati” disebutkan secara jelas, maksudnya secara jelas berita langsung menyebutkan nama si aktor/pelaku yaitu “Asfinawati” sehingga pembaca langsung mengenali aktor/pelaku yang dimaksudkan oleh penulis berita. Kalimat kedua disebut asimilasi karena tidak disebutkan secara jelas “dua oknum polisi” yang melakukan penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan . Asimilasi pada dasarnya akan menimbulkan efek generalisasi seperti kata “dua oknum polisi” dapat menimbulkan imajinasi tersendiri bagi pembaca berita tersebut.

Data 20

Individualisasi	Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri , lantaran beberapa waktu lalu ada penemuan ratusan botol minuman alcohol yang didapat dari salah satu karaoke keluarga. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 14 Januari 2020 dengan Judul “Karoke Keluarga Jual Minol Satpol PP Jangan Panas di Awal Saja”, Lampiran 21, hal 106)
Asimilasi	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk bersikap tegas dengan menerapkan sanksi terhadap tempat karaoke keluarga yang menjual minum beralkohol (minol). (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 14 Januari 2020 dengan Judul “Karoke Keluarga Jual Minol Satpol PP Jangan Panas di Awal Saja”, Lampiran 21, hal 106)

Berdasarkan data 20, kalimat pertama adalah individualisasi, karena “Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri” disebutkan secara jelas, maksudnya secara jelas berita langsung menyebutkan nama si aktor/pelaku yaitu

“Tengku Azwendi Fajri” sehingga pembaca langsung mengenali aktor/pelaku yang dimaksudkan oleh penulis berita. Kalimat kedua disebut asimilasi karena tidak disebutkan secara jelas “Pemerintah Kota (Pemko)” agar bersikap tegas dengan menerapkan sanksi terhadap tempat karaoke keluarga yang menjual minum beralkohol (minol). Asimilasi pada dasarnya akan menimbulkan efek generalisasi seperti kata “Pemerintah Kota (Pemko)” dapat menimbulkan imajinasi tersendiri bagi pembaca berita seperti menganggap “Pemerintah Kota (Pemko)” tidak becus dalam melakukan tugasnya dilapangan.

2.2.2.7 Asosiasi-disosiasi

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah pelaku atau suatu pihak ditampilkan sendiri atau dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Elemen asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau pelaku sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Ini adalah proses yang sering terjadi tanpa kita sadari (Eriyanto, 2000:189).

Data 21

Disosiasi	Penyidik, kata dia, masih melengkapi berkas perkara <i>Suhendri Asnan</i> . (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 16 Desember 2019 dengan Judul “Korupsi Dana Hibah di Bengkalis TA 2012 Berkas SA tak Kunjung Lengkap”, Lampiran 23, hal 108)
Asosiasi	Diketahui, Suhendri Asnan ditetapkan sebagai tersangka <i>bersama oknum mantan DPRD Bengkalis lainnya</i> , Yudhi Veryantoro. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Senin, 16 Desember 2019 dengan Judul “Korupsi Dana Hibah di Bengkalis TA 2012 Berkas SA tak Kunjung Lengkap”, Lampiran 23, hal 108)

Berdasarkan data 21, dalam kalimat pertama disebut disosiasi karena “Suhendri Asnan” tidak dihubungkan dengan kelompok atau seseorang yang lebih luas. Sementara kalimat kedua disebut asosiasi karena “Suhendri Asnan” di hubungkan dengan kelompok lain yaitu “oknum mantan DPRD Bengkalis lainnya”. Dengan memberikan asosiasi seperti representasi masyarakat yang membaca berita akan berbeda dalam kalimat petama “Suhemdri Asnan” hanya ditangkap sendirian saat melakukan korupsi, tapi pada kalimat kedua menjelaskan bahwa “Suhendri Asnan” melakukan korupsi bersama “mantan DPRD Bengkalis lainnya”, artinya ada mantan anggota DPRD Bengkalis yang melakukan korupsi bersama Suhendri Asnan.

Data 22

Disosiasi	<i>Tutin Apriyani</i> (berhijab hijam) terpidana korupsi Tiket Garuda Jilid V di Denpasar Bali, saat berada di Kejati Riau. (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “Mantan Karyawan Garuda Buronan Korupsi Tiket Diringkus”, Lampiran 22, hal 107)
Asosiasi	Diketahui, Tutin Apriyanti terlihat korupsi pengadaan tiket <i>bersama dua rekannya, Suhaimin Nidhom, dan AA Istri Wahyuni, karyawan DP-SKD PT Garuda Bandara Ngurah Rai, Bali.</i> (Surat Kabar <i>Haluan Riau</i> , Publikasi Selasa, 3 Desember 2019 dengan Judul “Mantan Karyawan Garuda Buronan Korupsi Tiket Diringkus”, Lampiran 22, hal 107)

Berdasarkan data 22, dalam kalimat pertama disebut disosiasi karena “Tutin Apriyani” tidak dihubungkan dengan kelompok atau seseorang yang lebih luas. Sementara kalimat kedua disebut asosiasi karena “Tutin Apriyani” di hubungkan dengan kelompok lain yaitu “Suhaimin Nidhom, dan AA Istri Wahyuni, karyawan

DP-SKD PT Garuda Bandara Ngurah Rai, Bali”. Dengan memberikan asosiasi seperti representasi masyarakat yang membaca berita akan berbeda dalam kalimat pertama “Tutin Apriyani” hanya ditangkap sendirian saat melakukan korupsi, tapi pada kalimat kedua menjelaskan bahwa “Tutin Apriyani” melakukan korupsi bersama “Suhaimin Nidhom, dan AA Istri Wahyuni, karyawan DP-SKD PT Garuda Bandara Ngurah Rai, Bali”.

2.3. Interpretasi Data

Interpretasi data pada berita politik surat kabar *Haluan Riau*, penulis memberikan penafsiran. Interpretasi data ini tersaji secara teratur dan jelas. Penulis menginterpretasikan data mengenai teori eksklusi dan inklusi Theo van Leeuwen sebagai berikut :

2.3.1 Teori eksklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*

Berdasarkan analisis data, teori eksklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* terdapat 7 data. Teori eksklusi Theo van Leeuwen pasivasi-aktif terdapat 5 data, verba-nominalisasi terdapat 1 data, dan penggantian anak kalimat terdapat 1 data. Dari 3 strategi yang paling banyak ditemukan yaitu pasivasi-aktif sebanyak 7 data, faktor penyebab terjadinya antara lain, strategi ini menghilangkan objek/pelaku dengan cara mempasifkannya sehingga penulis berita lebih cenderung menggunakan strategi ini, sedangkan data yang paling sedikit digunakan adalah verba-nominalisasi terdapat 1 data dan penggantian anak kalimat tidak terdapat 1 data, faktor penyebab terjadinya verba-nominalisasi yaitu menghilangkan kelompok/aktor sosial di dalam sebuah pemberitaan lewat

nominalisasi, strategi ini jarang digunakan karena penghilangan kelompok/aktor sosial didalam pemberitaan menggunakan strategi ini terlalu mencolok karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan/kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa, kemudian faktor penyebab terjadinya penggantian anak kalimat yaitu penggantian subjek dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor, strategi ini jarang digunakan karena penulis/wartawan umumnya percaya dan menganggap bahwa khalayak pembaca tahu siapa aktor yang dihilangkan oleh penulis/wartawan sehingga memberikan dampak kurang percaya terhadap berita yang disajikan dalam surat kabar jika terlalu sering membuat strategi wacana ini.

2.3.2 Teori Inklusi Theo van Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar *Haluan Riau*

Berdasarkan analisis data, teori inklusi Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* terdapat 22 data. Teori inclusion Theo van Leeuwen dibagi menjadi 7 strategi yaitu (1) diferensiasi-indiferensiasi terdapat 3 data, (2) objektivasi-abstraksi terdapat 5 data, (3) nominasi-kategorisasi terdapat 2 data, (4) nominasi-identifikasi terdapat 2 data, (5) determinasi-indeterminasi terdapat 2 data, (6) asimilasi-individualisasi terdapat 6 data, dan (7) asosiasi-diasosiasi terdapat 2 data. Dari 7 strategi yang paling banyak ditemukan yaitu asimilasi-individualisasi sebanyak 6 data, penyebab terjadinya strategi ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah pelaku sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi terjadi ketika di dalam pemberitaan bukan kategori pelaku sosial yang spesifik yang disebut di dalam berita, melainkan komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada, sedangkan data yang paling sedikit

ditemukan adalah nominasi-kategorisasi terdapat 2 data, nominasi-identifikasi terdapat 2 data, determinasi-indeterminasi terdapat 2 data dan asosiasi-diasosiasi terdapat 2 data, penyebab terjadinya strategi nominasi-kategorisasi pemberitaan mengenai aktor (seseorang/kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Penyebab terjadinya nominasi-identifikasi yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan, bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Penyebab terjadinya determinasi-indeterminasi dalam pemberitaan sering kali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi sering kali juga tidak jelas (anonim) dan penyebab terjadinya asosiasi-diasosiasi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah pelaku atau suatu pihak ditampilkan sendiri atau dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Elemen asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau pelaku sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Ini adalah proses yang sering terjadi tanpa kita sadari.

BAB III KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data dan interpretasi data, Penulis menyimpulkan bahwa analisis wacana Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Teori Theo van Leeuwen strategi eksklusi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* terdapat 7 data, teori eksklusi strategi pasivasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 5 data. Contoh **strategi pasivasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah ‘Pemilu serentak 2019 *disebutkan* sebagai pemilu terbesar di dunia, bahkan terumit di dunia’ bentuk pasif, dikatakan bentuk pasif karena kalimat tersebut mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang menyebutkan bahwa pemilu 2019 sebagai pemilu terbesar dan terumit di dunia, sama sekali tidak disinggung siapakah sebenarnya yang menyebutkan hal tersebut. **Strategi nominalisasi** berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 1 data. Contoh strategi nominalisasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas adalah ‘Pak Jokowi hutang mata Saudara Novel Baswedan. Sudah 2,5 tahun lebih kasus Novel Baswedan dan tidak jelas *penyelesaiannya*’ bentuk nominalisasi, dikatakan bentuk nominalisasi karena nominalisasi tidak membutuhkan subjek dan nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan/kegiatan yaitu kegiatan “*menyelesaikan*” ditransformasikan sebagai peristiwa “*penyelesaian*”. **Strategi pengganti anak kalimat** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 1 data. Contoh strategi penggantian anak kalimat dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas adalah ‘Karena menurut

Wakil Ketua Umum Gerindra itu, seringkali *melakukan* perubahan itu, baik perubahan konstitusi maupun UU, sangat tergantung kepada satu situasi dicari dan yang menguntungkan'. sedangkan kalimat kedua tidak disebutkan aktor/pelaku/lembaga yang melakukan perubahan UU, ditandai dengan kalimat "seringkali melakukan perubahan itu" kalimat tersebut menghilangkan subjek pelaku yang merubah UU, seharusnya sebelum kata "melakukan" terdapat aktor tetapi pada kalimat tersebut dihilangkan dan diganti dengan anak kalimat yaitu "seringkali melakukan perubahan itu".

2. Teori Theo van Leeuwen strategi inklusi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* terdapat 22 data, teori inklusi **strategi diferensiasi-indiferensiasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 3 data. Contoh strategi diferensiasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* yaitu "Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)" untuk disudutkan pihak RSUD Meranti. **Strategi objektivasi-abstraksi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 5 data. Contoh strategi objektivasi-abstraksi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah 'Rp200 juta' bentuk objektivasi karena jelas dikatakan 200 juta dan 'tak sampai' bentuk abstraksi karena kata tak sampai tersebut tidak jelas dalam berita. Strategi nominasi-kategorisasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 2 data. **Contoh strategi nominasi-kategorisasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah 'Wagubri menegaskan, pihaknya telah melakukan tes urine terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau' bentuk nominasi karena tanpa ada penambahan kategori lagi di depan kata ASN tersebut dan 'Bagi ASN

yang memiliki moralitas dan integritas, tidak ada namanya posisi jabatan basah dan kering' bentuk kategorisasi karena diberikan kategori "moralitas dan integritas" sama sekali tidak merupakan penambahan yang berguna karena seharusnya seluruh ASN sudah memiliki sikap seperti itu tanpa harus disebutkan. **Strategi nominasi-identifikasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 2 data. Contoh strategi nominasi-identifikasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah 'Sementara itu, anggota DPRD Riau, menyayangkan rendahnya, deviden yang diberikan oleh Aryaduta, sebagai salah satu hotel terbesar di Riau' bentuk identifikasi karena terdapat anak kalimat "sebagai salah satu hotel terbesar di Riau" adalah identifikasi yang diberikan oleh wartawan identifikasi tersebut bisa menjadi penilaian kearah mana peristiwa tersebut harus di jelaskan. Dengan memberi anak kalimat "sebagai salah satu hotel terbesar di Riau", hotel Aryaduta akan di gambarkan buruk karena memberikan deviden yang rendah ke Riau. **Strategi determinasi-indeterminasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 2 data. Contoh strategi determinasi-indeterminasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah 'Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsuet) akhirnya memutuskan untuk mundur dari pencalonan ketua umum Golkar' bentuk indeterminasi karena nama "Bambang Soesatyo" ditunjukkan secara spesifik dan 'Mundurinya Bamsuet dan rekonsiliasi itu disebut melibatkan utusan Presiden Joko Widodo' bentuk determinasi karena "utusan Presiden Joko Widodo" tidak lagi bermakna tunggal, tetapi jamak. **Strategi asimilasi-individualisasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 6 data. Contoh

strategi asimilasi-individualisasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah ‘Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Rudianto Sumarwono meluruskan wacana tersebut’ bentuk individualisasi karena kategori “Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Rudianto Sumarwono” disebutkan secara jelas dan ‘Dia mengatakan hal tersebut bukan berasal dari pihaknya, melainkan keinginan dari pihak Kementerian PAN-RB sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2019’ bentuk asimilasi karena tidak disebutkan nama pihak Kementerian PAN-RB tetapi yang diacu adalah lembaga yang bernama “Kementerian PAN-RB”. **Strategi asosiasi-disosiasi** dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* di atas terdapat 2 data. Contoh strategi asosiasi-disosiasi dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau* adalah ‘Penyidik, kata dia, masih melengkapi berkas perkara Suhendri Asnan’ bentuk asosiasi karena “Suhendri Asnan” tidak dihubungkan dengan kelompok atau seseorang yang lebih luas dan ‘Diketahui, Suhendri Asnan ditetapkan sebagai tersangka bersama oknum mantan DPRD Bengkalis lainnya, Yudhi Veryantoro’ bentuk asosiasi karena “Suhendri Asnan” di hubungkan dengan kelompok lain yaitu “oknum mantan DPRD Bengkalis lainnya”.

BAB IV HAMBATAN DAN SARAN

4.1 Hambatan

Dalam hal ini, penulis ingin mengungkapkan kendala-kendala yang peneliti hadapi selama melakukan penelitian yaitu:

1. Hambatan dalam menemukan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini
2. Hambatan dalam menganalisis teori Theo van Leeuwen dalam berita politik surat kabar *Haluan Riau*. Hal ini disebabkan data pada berita politik surat kabar harian *Haluan Riau* sedikit didapatkan oleh penulis.

4.2 Saran

1. kepada pihak perpustakaan UIR agar dapat melengkapi buku-buku referensi sehingga memudahkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian.
2. Peneliti lanjutan hendaknya dilakukan dengan teori-teori yang lainnya. Penelitian yang peneliti lakukan hanya membahas tentang analisis wacana kritis teori Theo van Leeuwen. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat membahas analisis wacana kritis dari teori Teun A. van Dijk, Sara Mills dan Norman Fairclough.

DAFTAR PUSTAKA

- Alber,A. (2018). "*Analisis Kesalahan Penggunaan Frasa pada Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas*".Jurnal GERAM (Gerakan Aktif Menulis), Volume 9 No 1. (<http://dx.doi.org/10.26499/madah.v9i1.689>) diakses 20 Oktober 2019
- Aliah Darma, Y. (2014). "*Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*". Bandung: Refika Aditama.
- Alwi, H. dkk. (2003). "*Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Andheska, H. (2015). "*Ekslusi dan inklusi pada rubrik Metropolitan Harian Kompas: Analisis wacana kritis berdasarkan sudut pandang Theo Van Leeuwen*". Jurnal Bahastra, Volume 34 No1 , 51–68.
- Arikunto, S. (2010). "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriani, Y. (2019). "*Analisis Wacana Kritis Model Eksklusi Theo Van Leeuwen Dalam Berita Kriminal Koran Harian Analisa Edisi April 2019*". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Depdiknas. (2008). "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Djajasudarma, T. F. (2010). "*Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*". Bandung: Refika Aditama.
- Eriyanto. (2000). "*Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*". Yogyakarta: LKiS.
- Haluan Riau. (2019). "*Korupsi Dana Hibah di Bengkalis TA 2012 Berkas SA Tak Kunjung Lengkap*". *Senin, 16 Desember, 7*.
- Hamidy, U. (2003). "*Metodologi Penelitian Disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*". Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Harian Haluan. "*Tentang Kami*". Harian Haluan.Com. Retrieved November 18, 2019, from <https://www.harianhaluan.com/mobile/about>
- Meleong, J. (2012). "*Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.)*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nursapia. (2014). "*Penelitian Kepustakaan*". Jurnal Iqra',Volume 8 Nomor 1.
- Oktavia, Y., & Silitonga, F. (2016). "*Implementasi Analisis Wacana Kritis Perspektif Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar Padang Ekspres Terhadap Pembelajaran Bahasa Berbasis Teks*". 1(2), 201–213.
- Piliang, N. F. (2018). "*Koran Haluan Riau Terbaik Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia*". Pekanbaru: Riau Mandiri.
- Romli, A. S. M. (2005). "*Jurnalis Terapan : Suatu Pengantar*". Bandung: Batik

Press.

- Sari, S. P. (2014). "*Analisis Wacana Kritis pada Berita Kriminal Surat Kabar Posmetro Padang*". Jurnal: *Majalah Ilmiah, Volume 25 Nomor 2* 124-137 (<http://lppm.upiypk.ac.id/ojs3/index.php/MAJALAHILMIAH/index>)
- Sugiyono. (2013). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta.
- Sumadiria, A. H. (2006). "*Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Menulis dan Jurnalis*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumaridia, A. H. (2017). "*Jurnalistik Indonesia menulis berita dan feature: panduan praktis jurnalis profesional*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarlan. (2003). "*Teori dan Praktik Analisis Wacana*". Surakarta: Pustaka Cakra.
- Susanti, S. (2011). "*Analisis Isi Berita Kriminal pada Surat Kabar Pekanbaru MX Edisi Januari 2010*". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sutrisna, D. (2017). "*Analisis Kesalahan Morfologi Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar Radar Majalengka Edisi 16 dan 25 April 2016*". Volume 1.
- Tarigan, H. G. (2009). *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.